

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA KUALA PENASO
KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusun Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



RINAWATI
NPM. 147310564

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

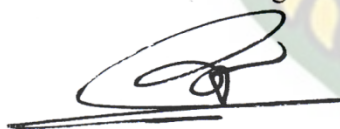
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : RINAWATI
NPM : 147310564
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul UP : “Implementasi Kebijakan Pemerintahan Daerah
Dalam Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan
Masyarakat Desa Kuala Pesano Kabupaten
Bengkalis”

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam usulan penelitian ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diseminarkan.

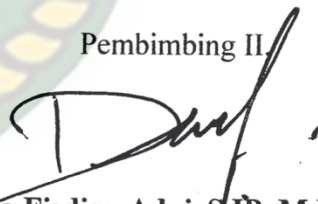
Pekanbaru, Februari 2020

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, Sh. M.Hum

Pembimbing II



Dita Fisdian Adni, S.I.P. M.I.P

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,



Budi Mulyanto, S.I.P., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama	:	Rinawati
NPM	:	147310564
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	:	Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 02 April 2020

Ketua,


Dr. H. Rahyunir Rauf. M.Si

Sekretaris,

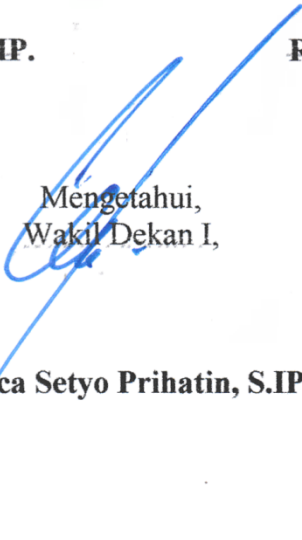

Budi Mulianto, S.IP., M.Si

Anggota


Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP.

Notulen

Rijalul Fikri, S.Sos., Ma


Mengetahui,
Wakil Dekan I,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

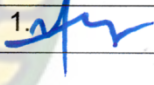
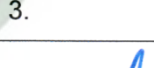
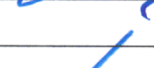
UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 085/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 24 Maret 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 26 Maret 2020 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Rinawati
 NPM : 147310564
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis.

Nilai Ujian : Angka : " 73,1 " ; Huruf : " B "
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.	Ketua	1. 
2.	Budi Muliando, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA	Anggota	3. 
4.	Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum.	Anggota	4. 
5.	Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP.	Anggota	5. 
6.	Rijalul Fikri, S.Sos., MA.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 26 Maret 2020
 An. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
 Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 085/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Rinawati**
N P M : 147310564
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis..

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Budi Muliando, S.IP., M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH. M. Hum | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 5. Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 6. Rijalul Fikri, S.Sos., MA | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 24 Maret 2020
An. Dekan

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi IP.....
4. Arsip...SK Penguji ...

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	:	Rinawati
NPM	:	147310564
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	:	Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh Karena itu dapat di sahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 02 April 2010
An. Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

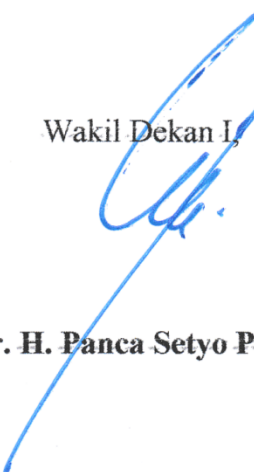

Dr. H. Rahyunir Rauf. M.Si

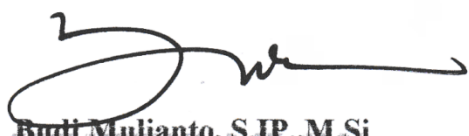

Budi Mulianto, S.IP.,M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

Ketua,
Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP.,M.Si


Budi Mulianto, S.IP.,M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis”** Yang merupakan salah satu syarat guna mengikuti ujian konferehensif sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekeliruan dan kurang sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kemajuan penulis pada masa yang akan datang.

Dalam penelitian ini penulis tidak terlepas dari bantuan banyak dari pihak yang ikhlas memberi waktu, motivasi, saran serta kritik sehingga skripsi dapat terselesaikan. Untuk itu dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulusnya kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Bapak Prof. Syafirinaldi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Pemerintahan.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Budi Malyanto, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, Sh. M.Hum sebagai pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Dita Fisdian Adni, S.IP. M.IP selaku Pembimbing II, yang telah memberikan waktu, pikiran dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat disebutkan nama dan jabatannya satu persatu yang telah mendidik dan memberikan ilmu, dorongan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. kedua Orang tua Ku tercinta Ayahanda dan Ibunda yang tidak henti-hentinya selalu memberikan do'a, perlindungan, dan kasih sayang serta perhatian yang tak terhingga serta selalu memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada suamiku yang tiada henti-hentinya memberi semangat, baik itu dari finansial maupun moril. Yang tiada henti dan lelah menjadi supir saya untuk penelitian ini
9. Kepada anak ku nadira syahfika syahputra yang menjadi hadiah terbaik buatku, yang jadi penyemangat.

10. Terimakasih buat adiku lili lestari yang telah memberi semangat dan dorongan saat terpuruk, semangat buat menyelesaikan kuliahnya. Janga seperti kakak yang lama.
11. Dan terimakasih buat temanku yang terlihat maupun tidak terlihat, buat semangat serta dorongannya. Terimakasih sekali lagi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Pekanbaru, Maret 2020
Penulis,

Rinawati

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
SURAT PERNYATAAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	19
1. Tujuan Penelitian	19
2. Manfaat Penelitian	19

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan.....	21
1. Konsep Pemerintahan.....	21
2. Pemerintahan Desa.....	23
3. Kebijakan	25
4. Konsep Implementasi.....	27
5. Pemberdayaan	33
6. Masyarakat Desa	35
7. Pembangunan	36

B. Penelitian Terdahulu	38
C. Kerangka Pikir.....	39
D. Konsep Operasional	40
E. Operasional Variabel.....	41
F. Teknik Pengukuran	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian	45
C. Populasi dan Sampel	46
D. Teknik Penarikan Sampel.....	47
E. Jenis dan Sumber Data	47
F. Teknik Pengumpulan Data	48
G. Teknik Analisa Data.....	49
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Profil Kecamatan Pinggir	50
1. Profil Desa Kuala Penaso.....	51
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kuala Penaso.....	52
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Data.....	53
B. Hasil Penelitian tentang Implementasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis	54

C. Hasil Penelitian tentang Implementasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis.....	54
1. Komunikasi	55
2. Sumber Daya.....	60
3. Struktur Birokrasi.....	65
4. Disposisi.....	71
D. Kendala Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis.	80
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel I.1. Susunan Tugas organisasi Badan Pembangunan Pemberdayaan masyarakat desa di Desa Kuala Penaso, Kecamatan Pinggir.....	7
Tabel I.2. Rincian Anggaran Pembiayaan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuala Penaso	13
Tabel II.1. Operasional Variabel Implementasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayan Masyarakat Desa Di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Pesano Kecamatan Bengkalis	42
Tabel III.1. Jumlah Populasi dan Sampel Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis	47
Tabel V.1 Jawaban Kuesioner tentang Implementasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis pada indikator komunikasi	59
Tabel V.2 Jawaban Kuesioner tentang Implementasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis pada indikator sumber daya.....	64
Tabel V.3 Jawaban Kuesioner tentang Implementasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis pada indikator struktur birokrasi	69
Tabel V.4 Jawaban Kuesioner tentang Implementasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pinggir	

	Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis pada indikator disposisi	73
Tabel V.5	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Tentang Implementasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis	75



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Pikir Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Kuala Pesano Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.....	39
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir	52

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Wawancara Penelitian	85
Lampiran 2 Kuisisioner Penelitian	86
Lampiran 3 Rekapitulasi Hasil Kuesioner	85
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian.....	90



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar usulan penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rinawati
NPM : 147310564
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Usulan Penelitian : Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis

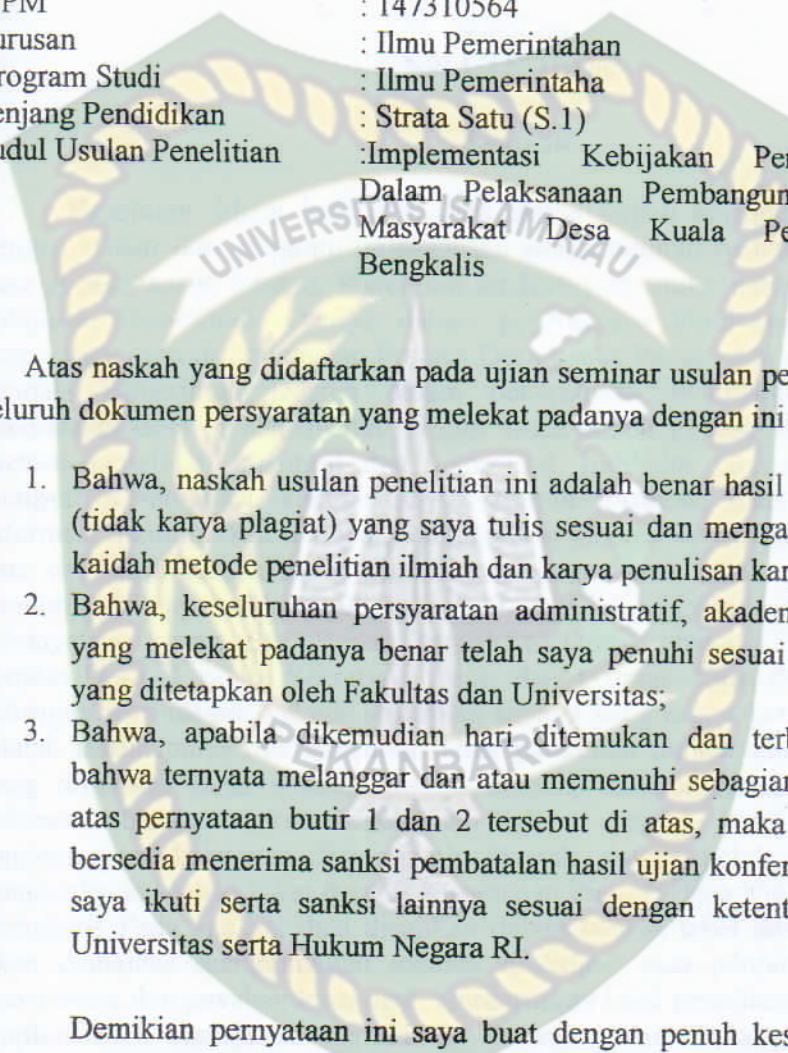
Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar usulan penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah usulan penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan karya penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa ternyata melanggar dan atau memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Maret 2020

Pelaku Pernyataan



C1AHF292544501
RINAWATI

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis

Rinawati
NPM. 147310564

Abstrak

Penelitian dilatar belakangi oleh sering terjadi kegagalan atau tidak sesuai dengan tujuan dari program pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat desa di desa Kuala Penaso. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pembangunan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis dan kendala Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pembangunan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis. Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Indikator penilaian yang digunakan meliputi Komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi. Data dan informasi dikumpulkan dengan menggunakan angket, wawancara serta dokumentasi data dan informasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan variabel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala keluarga(masyarakat desa) sebanyak 11 orang, BPD(Badan Perwakilan Desa) sebanyak 3 orang, dan 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, dan 1 orang Kaur Pembangunan sebagai informan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Data penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui hasil angket terhadap sampel penelitian. Kemudian data sekunder berupa dokumen-dokumen, data statistik yang berkaitan tentang implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pembangunan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis Pada analisis data disajikan dalam bentuk tabel dan tulisan, yang mana akan dianalisis menggunakan metode deskriptif atau penjabaran. hasil jawaban wawancara dan jawaban kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis adalah kurang terimplementasi, karena berada pada interval 34-66% (kurang terimplementasi). 2) Kendala Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis adalah masih kurangnya sumber daya, karena membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai tujuan program PPMD.

Kata Kunci : Implementasi, kebijakan, Pemerintah daerah, Pemberdayaan

*Implementation of Local Government Policy in the Implementation of Village
Community Empowerment in the Sub-Subdistrict of Pinggir Kuala Penaso
Village, Bengkalis Regency*

*Rinawati
NPM. 147310564*

Abstract

The research is motivated by the frequent failure or not in accordance with the objectives of the implementation program of village community empowerment development in the village of Kuala Penaso. This study aims to determine the implementation of Local Government policies in the implementation of rural community empowerment development in the Sub-District of Pinggir Sub-Village Kuala Penaso Bengkalis Regency and the constraints of the Regional Government in the implementation of rural community empowerment development in the Sub-Sub-District of Kuala Penaso Sub-District of Kuala Penalis Regency. Qualitative and quantitative research methods. The assessment indicators used include communication, resources, bureaucratic structure and disposition. Data and information were collected using a questionnaire, interviews and documentation of the data and information used as a basis to explain the research variables. The sample in this study were 11 heads of family (village community), 3 BPD (Village Representative Body), and 1 Village Head, 1 Village Secretary, and 1 Development Kaur as the interview informant. The sampling technique used in this study was purposive sampling technique. This research data sourced from primary data obtained through the results of a questionnaire on the research sample. Then the secondary data in the form of documents, statistical data relating to the implementation of Local Government policies in the implementation of rural community empowerment development in the Sub-District of Kuala Penaso Village, Bengkalis Regency In the analysis of the data presented in tabular and written form, which will be analyzed using descriptive or elaboration methods . the results of interview answers and questionnaire answers. Based on the results of the study note that: 1) Implementation of Local Government Policy in the Implementation of Village Community Empowerment in the Sub-District of Sub-District of Kuala Penaso Village Bengkalis Regency is less implemented, because it is at an interval of 34-66% (less implemented) . 2) Obstacles to Implementation of Local Government Policies in the Implementation of Village Community Empowerment in the Sub-Subdistrict of Kuala Penaso Village Bengkalis Regency is still a lack of resources, because it requires more time to achieve the objectives of the PPMD program

Keywords: Implementation, Policy, Regional government, Empowerment

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya terarah dan terpadu serta berkesinambungan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat dalam rangka menunjang pencapaian masyarakat adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya pemerintah harus meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat untuk mendorong tumbuhnya prakasa dan kreatifitas lokal. Pembangunan juga merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang dilaksanakan secara berencana dan menyeluruh yang meliputi semua segi kehidupan.

Manajemen pembangunan Indonesia mengikuti pola teori manajemen modern. Dalam teori manajemen modern ada tiga kegiatan besar dalam pembangunan yaitu, perencanaan, pelaksanaa, serta pemantauan dan pengawasan. Praktek perencanaan pembangunan yang sebenarnya yaitu sebagai usaha yang sistematis untuk memilih alternatif yang dapat ditempuh guna mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang realistis dan rasional.

Perencanaan pembangunan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan. Jadi perencanaan merupakan suatu proses yang sangat bermanfaat karena dapat membantu dalam mengelola kehidupan kita kearah yang lebih baik. Pada hakekatnya masyarakat sangat diperlukan dalam perencanaan serta proses pembangunan karena

masyarakat adalah penentu dari suksesnya pembangunan di wilayahnya. Selain masyarakat, para aparat pemerintah perannya juga sangat diperlukan sebagai pendukung serta pengarah demi suksesnya pembangunan di wilayahnya sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat serta aparat pemerintah itu sendiri. Kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat di desa kuala pesano masih kurang signifikan sebagaimana tujuan awalnya kebijakan pemerintah daerah tersebut diadakan. Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur pulau Sumatera dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 7.779,93 km². Pulau Bengkalis sendiri berada tepat dimuara sungai siak, sehingga dikatakan bahwa pulau Bengkalis adalah delta sungai siak. Kota terbesar di kabupaten ini adalah kota Duri, penghasilan terbesar Kabupaten Bengkalis adalah minyak bumi yang menjadi sumber terbesar APBD-nya bersama dengan gas, Kabupaten Bengkalis terbagi atas beberapa kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Pinggir yang merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Bengkalis. Penduduknya sebagian besar bekerja di sektor perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit. Kecamatan Pinggir terdiri dari 11 desa dan 2 kelurahan dimana salah satu desanya adalah Desa Kuala Pesano. Desa kuala pesano merupakan desa yang berada ditengah perkebunan sawit PT Adei, dimana masyarakat setempat masih minim akan kesejahteraan ekonomi, sedangkan dana desa yang ada di Kuala Pesano cukup banyak yang dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat agar dapat mensejahterakan perekonomiannya. Hal ini lah yang membuat penulis

memutuskan meneliti di Desa kuala pesano Kecamatan Pinggir, dimana dari 11 Desa di Kecamatan Pinggir Desa kuala pesano lah yang anggaran dana desanya terbanyak, sedangkan desa tersebut belum ada kemajuan. Desa kuala pesano belum baik dalam infrastruktur jalan maupun perekonomian masyarakatnya, hal inilah yang membuat penulis tertarik meneliti permasalahan pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat desa. Kabupaten Bengkalis di Otonomi Daerah yang dilaksanakan diseluruh Indonesia berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mana Pemerintah Pusat memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah dan perangkatnya untuk terus melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyaratan. Seiring dengan disahkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut maka Pemerintah Daerah berupaya mendorong terlaksananya sistem pembangunan yang bersifat partisipatif, dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengartikulasikan apresiasinya dalam pembangunan, dimana pemerintah Daerah melalui sistem perencanaan yang strategis, baik dan sistematis akan bersinergi dengan sistem pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang merupakan suatu proses yang membangun manusia dan masyarakat atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat dan pengorganisasian masyarakat, pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi social ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu. Adapun pemberdayaan pembangunan masyarakat desa diharapkan dapat memberi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara

langsung jika program pemberdayaan masyarakat desa tersebut berjalan sesuai tujuan awalnya, dimana manfaat tersebut antara lain :

1. Masyarakat setempat dapat memenuhi kebutuhan ekonominya baik itu untuk kebutuhan sandang, maupun pangan.
2. Infrastruktur jalan yang baik untuk memudahkan kegiatan ekonomi berjalan di desa tersebut.
3. Kemampuan masyarakat yang bertambah dan dapat bersaing dengan sumber daya manusia lainnya.

Bentuk Program-program pemberdayaan masyarakat di desa kuala penaso yang dilakukan antara lain:

1. Program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi

Yaitu merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Program ini mencakup pemberdayaan UKM, industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani, pasar, serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, workshop, pemodalan/permodalan, bantuan alat produksi, peningkatan sarana dan prasarana dan lain-lain. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

2. Program pemberdayaan masyarakat di bidang Pemerintahan Desa

pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan desa mencakup semua sumber daya yang ada dipemerintahan desa seperti kepala desa, perangkat desa dan BPD. Bentuk pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, musyawarah dalam penyusunan program-program desa, koordinasi dalam pelaksanaan program-program desa, dan

peningkatan kualitas kinerja di pemerintahan desa. Dengan adanya program pemberdayaan ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja di pemerintahan desa dalam membangun serta memajukan desa.

Salah satu sarana, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat untuk menterjemahkan sistem pembangunan yang bersifat partisipatif. Sesuai amanat UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, maka pemerintah menerbitkan PermenDesaPDTT 17 tahun 2019 tentang pedoman umum pembangunan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah membuat kebijakan untuk peningkatan sumber daya manusia, program pembangunan pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk mengawal pembangunan Indonesia dari pinggiran. Selain itu untuk membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas untuk mengelola perekonomiannya dari tingkat bawah. Kenapa penulis melakukan penelitian tentang pemberdayaan masyarakat desa dan mengapa daerah penelitiannya di Daerah Bengkalis, itu dikarenakan desa kuala penaso merupakan desa yang cukup baik dalam aspek masyarakat serta daerah yang memadai, namun dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat serta kurang kepedulian pemerintah setempat untuk membangun Desa ini, serta Desa ini merupakan desa yang masih tertinggal dibandingkan dengan Desa lainnya, dan pendidikan di Desa ini juga masih dalam taraf berkembang, aparatur desa pun masih belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pendamping desa oleh karena itu saya ingin meneliti permasalahan ini. Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan Program pemberdayaan masyarakat desa di desa kuala penaso, dimana dalam pendanaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis.

Adapun yang menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat desa diatas dijalankan oleh BPD dibantu oleh aparat desa sesuai kebutuhan dalam program pemberdayaan masyarakat desa tersebut.

Adapun susunan organisasi Badan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Pinggir desa Kuala Penaso antara lain:

- A. Kepala Badan
- B. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, yang membawahi 3 bagian
 - 1. Sub bagian perencanaan
 - 2. Sub bagian keuangan
- C. Bidang ketahanan masyarakat terdiri dari :
 - 1. Sub bidang kelembagaan masyarakat
 - 2. Sub bidang pemberdayaan masyarakat
- D. Bidang pemerintahan desa terdiri dari :
 - 1. Sub bidang tata pemerintahan desa
 - 2. Su bidang pendapatan dan kekayaan desa
- E. Bidang sosial budaya masyarakat terdiri dari :
 - 1. Sub bidang usaha ekonomi masyarakat dan evaluasi
 - 2. Sub bidang penanggulangan kemiskinan

Table 1.1 : Susunan Tugas organisasi Badan Pembangunan Pemberdayaan masyarakat desa di Desa Kuala Penaso, Kecamatan Pinggir

No	Nama	Jabatan	Tugas dalam Program Pembangunan Pemberdayaan
1	Bosniar	Kepala Badan	Tugas memutuskan segala program-program yang diajukan anggota masyarakat dan seksi-seksi dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat desa
2	Abdul Bakar	Sekretaris	Mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit di program pembangunan pemberdayaan masyarakat desa
3	Dedi Aditama	Sub Bagian Perencanaan dan keuangan	Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana program kerja, rencana anggaran, dan penatausahaan asset serta pelaporan.
4	Safrizal	Sub kelembagaan masyarakat	Mempunyai tugas membantu kepala badan merumuskan, menyusun mengkoordinasi, menyelenggarakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kemasyarakatan desa
5	Sucipto	Sub pemberdayaan masyarakat	Mempunyai tugas membantu kepala badan melaksanakan, penyusunan, mengkoordinasika, monitoring dan pelaporan kebijakan dibidang pengembangan pemberdayaan masyarakat desa
6	Izambri	Sub Tata Pemerintahan Desa	Mempunyai tugas membantu kepala badan, dalam mengkoordinasi pemerintahan setempat dalam program pemberdayaan masyarakat desa
7	Haryanto	Sub bidang pendapatan dan kekayaan desa	Mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan, evaluasi, dan pelaporan dibidang sumber daya alam yang ada di lingkungan masyarakat desa
8	Mena	Sub Usaha Ekonomi Desa	Mempunyai tugas membantu kepala desa dalam monitoring, evaluasi, penataan, pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat desa dalam usaha ekonomi masyarakat
9	M. Adis	Sub penanggulangan kemiskinan	Mempunyai tugas mengevaluasi, memonitoring, dan pelaksanaan kebijakan dalam program pengentasan kemiskinan di masyarakat desa.

Melihat beberapa variabel-variabel seperti : Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi akan dapat menentukan keberhasilan dari Implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang Pembangunan pemberdayaan masyarakat desa ini. Program Pembangunan pemberdayaan masyarakat desa yang dijalankan di Desa Dusun Jiat Yang menjadi dasar dari program Pembangunan pemberdayaan masyarakat desa ini yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48 : Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:

- Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
- Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
- Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51:

- Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.

- Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi mengawasi kinerja kelas Desa.

Dan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 diatur sesuai dengan kondisi desa, apakah desa maju, berkembang, atau desa tertinggal dan atau desa sangat tertinggal. Dengan demikian dengan Permendes No 20 Tahun 2016 Tentang prioritas dana desa Tahun 2017 akan memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggara kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh desa itu sendiri untuk masyarakat setempat yang ada. Menjadi sarana bagi masyarakat untuk belajar mempromosikan diri sebagai subyek dan sekaligus sebagai obyek dari pembangunan di daerah mereka masing-masing. Program Pembangunan pemberdayaan masyarakat desa menjadikan masyarakat semakin mandiri, dalam artian masyarakat mampu mengorganisir diri untuk memobilisasikan sumber daya yang ada di lingkungan, masyarakat diberi kesempatan untuk berpendapat, mengidentifikasikan kebutuhan, berkompetisi, mengambil keputusan dan melaksanakan kegiatan dengan semangat swadaya dan keterbukaan.

Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah bagian dari upaya pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dengan menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa merupakan koreksi terhadap sistem pembangunan terdahulu, yang pada umumnya dinilai bersifat sentralistik. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa juga merupakan

penyempurnaan terhadap berbagai program penanggulangan kemiskinan terdahulu yang dinamakan Induk Desa Tertinggal (IDT).

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa diharapkan dapat menjadi suatu system pembangunan yang memungkinkan segala bentuk sumber daya pembangunan dapat diakses secara merata dan adil oleh seluruh pelaku dan komponen bangsa. Secara umum visi Pembangunan pemberdayaan masyarakat desa adalah terwujudnya masyarakat mandiri dan sejahtera. Mandiri berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya. Sejahtera berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

Adapun dasar-dasar kebijakan yang mengatur tentang Dana Pembangunan Pemberdayaan masyarakat desa dikutip dari peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam pasal 72 UU No. 6 Tahun 2014 antara lain adalah:

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
5. Bantuan keuangan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
6. Lain-lain pendapatan Desa yang Sah

- a. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
- b. Alokasi dana desa yang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- c. Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, kepala desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk.
- d. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penunduan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Dana.

Susunan Struktur Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis tentang susunan organisasi dan tata kerja pembangunan masyarakat Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

- A. Kepala Desa
- B. Sekretaris Desa Terdiri Dari:
 1. Kaur Keuangan
 2. Kepala Urusan Pembangunan
 3. Kaur Umum

4. Laur Kesra

5. Kaur Pemerintah

C. Kepala Pelaksana Kewilayahan / Dusun

1. Dusun Serai

Penanggulangan kemiskinan dengan menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pedekatan operasional, merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam merealisasikan kesejahteraan sosial dan sekaligus sebagai objek dari pembangunan di daerah mereka masing-masing. Progam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadikan masyarakat semakin mandiri, dalam artian masyarakat mampu mengorganisir diri untuk memobilisasikan sumber daya yang ada dilingkungan. Masyarakat diberi kesempatan untuk berpendapat, mengidentifikasi kebutuhan, berkompetisi, mengambil keputusan dan melaksanakan kegiatan dengan semangat swadaya dan keterbukaan.

Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah bagian dari upaya pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dengan menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Program ini merupakan koreksi terhadap sistem pemberdayaan terdahulu, yang pada umumnya dinilai bersifat sentralistik. Juga merupakan yang dinamika Induk Desa Tertinggal (IDT).

Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa diharapkan dapat menjadi suatu sistem pembangunan yang memungkinkan segala bentuk sumber daya pemberdayaan dapat diakses secara merata dan adil oleh seluruh pelaku dan

komponen bangsa. Secara umum visi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa adalah terwujudnya masyarakat mandiri dan sejahtera. Mandiri berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada dilingkungannya. Penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakatnya. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan Perwujudan nyata dari upaya menanggulangi kemiskinan dan mendorong pembangunan di daerah. Dalam pelaksanaannya, masyarakat terus didorong untuk menentukan sendiri kegiatan pembangunan daerahnya secara musyawarah sesuai dengan kebutuhannya.

Dana yang diperoleh oleh masyarakat desa Kuala Penaso dibagikan langsung oleh aparat desa yang bersangkutan, serta berapa jumlah dana yang diperoleh oleh desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis yang di masukkan kedalam dana BUMdes dapat di lihat dari table uraian Biaya Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis Tahun 2017

Tabel 1.2 Rincian Anggaran Pembiayaan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuala Penaso

No	Uraian Pembiayaan	Anggaran		
		Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Penerimaan Pembiayaan			957.692.912,00
2	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			957.692.912,00

3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Penghematan Belanja			4.060.060,00
4	Silpa AAD SAD	1 Tahun	4.060.060,00	4.060.060,00
5	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kegiatan yang Belum Dilaksanakan			953.632.652,00
6	Slipa DD SDD	1 Tahun	671.689.499,00	671.689.499,00
7	Slipa P3ID SBK	1 Tahun	201.186.500,00	201.186.500,00
8	Slipa Pajak dan Retribusi SBH	1 Tahun	75.756.903,00	75.756.903,00
9	Slipa PAD	1 Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
10	Pengeluaran Pembiayaan			221.580.500,00
11	Penyertaan Modal Desa			221.580.500,00
12	Penyertaan Modal Program pembangunan pemberdayaan masyarakat desa	1 Tahun	200.624.500,00	200.624.500,00
13	Penyertaan Modal BUMdes	1 Tahun	20.956.000,00	20.956.000,00
Jumlah (Rp)			736.956.000,00	

Sumber : Kantor Kepala Desa Kuala Penaso 2017

Dari data diatas terlihat bahwa jumlah biaya Program pembangunan pemberdayaan masyarakat desa yang di berikan Kepala Desa Kuala Penaso cukup besar yang berjumlah Rp. 200.624.500,00. Yang dimana diharapkan dana desa ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut. Dari data diatas jelas bahwa pembiayaan untuk program pembangunan pemberdayaan masyarakat desa lebih besar daripada pembiayaan dana desa lainnya, yang diberika setiap tahunnya oleh kabupaten Bengkalis terhadap desa yang membutuhkan dana program pembangunan pemberdayaan masyarakat desa.

Perencanaan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa di kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso yang sudah berhasil dalam pelaksanaannya dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat antara lain adalah:

1. Program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan jalan di desa kuala penaso untuk menghubungkan jalan antara desa dengan desa lainnya sudah berhasil, kini jalan yang mulanya sulit dilalui karena banyaknya debu yang diakibatkan oleh lalu lintas mobil-mobil sawit PT, dimana jika tidak ditanggulangi dengan program pembangunan jalan tersebut, masyarakat akan terkena penyakit ISPA serta anak-anak yang berangkat kesekolah juga mengalami kesusahan saat musim penghujan datang. Dimana jalan yang dilalui akan berlumpur dan mengakibatkan akses jalan terputus untuk bersekolah.
2. Program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan jembatan jalan juga sudah terealisasi. Jembatan juga merupakan akses penting jalan masyarakat desa kuala penaso setempat. Karena ada beberapa perbatasan jalan yang dilalui masyarakat untuk kegiatan perekonomiannya dihalangi oleh aliran air sungai desa kuala pesano, yang dimana jika curah hujan tinggi, air akan meluap dan mengakibatkan akses perekonomian masyarakat akan terenti. Pembangunan jembatan tersebut sudah rampung sejak april 2018.
3. Program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan pos polisi menciptakan keamanan lingkungan desa, yang dimana desa kuala penaso terletak di tengah – tengah perkebunan kelapa

sawit PT Adei. Masyarakat setempat takut akan banyaknya ninja – ninja (pencuri) sawit yang meresahkan masyarakat dan membahayakan masyarakat setempat. Oleh karena itu anggaran dana Pembangunan pemberdayaan masyarakat desa dialokasikan untuk pembangunan pos polisi, dimana pos polisi ini sudah rampung dibangun awal januari 2017 lalu.

Program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu bagian dari program Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara global, sebagai wadah dalam penanggulangan kemiskinan adalah Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat, komitmen masyarakat untuk membangun desa dan kecamatannya dengan penuh tanggung jawab.

Adapun sasaran utama program Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah kelompok penduduk miskin pedesaan yang ada di kecamatan, desa / kelurahan dalam lingkup Kabupaten dan kecamatan dan desa yang telah dimekarkan dan disahkan menjadi wilayah seperti Kabupaten Bengkalis.

Namun dalam kegiatannya sering terjadi kegagalan atau tidak sesuai dengan tujuan dari program pembangunan pemberdayaan masyarakat desa, dapat dilihat dari fenomena – fenomena yang ditemukan tentang implementasi pembangunan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

1. Sulitnya memberikan pemahaman kepada masyarakat desa tentang bagaimana menggunakan dana Pelaksanaan pembangunan

pemberdayaan masyarakat desa yang baik guna mensejahterkan masyarakat desa tersebut. Hal ini disebabkan oleh masih minimnya pemahaman berkaitan dengan penggunaan dana tersebut.

2. Sulitnya dalam penyelenggaraan pemberdayaan dana desa dari kabupaten Bengkalis belum maksimal dalam pelaksanaannya, baik dalam waktu pencarian dana maupun titik sasaran desa yang akan diberikan dana Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa masih kurang tepat sasaran.
3. Sulitnya dalam peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa masih lemah, baik disebabkan system pendekatan yang kurang tepat.

Dari data yang didapatkan terlihat bahwa jenis usaha yang dijalankan oleh masyarakat Kecamatan Kuala Penaso sebagai pemanfaatan dana pemberdayaan masyarakat desa terdiri dari 5 jenis usaha, program - program usaha yang dijalankan oleh masyarakat tersebut, dibantu oleh program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa. Program-program tersebut antara lain :

1. Disektor pertanian, untuk program kelompok tani penangkar cabe desa kuala pesano. Masyarakat yang bekerja sebagai petani cabe dibina untuk melakukan penangkaran bibit cabe agar cabe yang dihasilkan oleh petani dari desa kuala pesano, adalah cabe – cabe ungu. Dan program pemberdayaan ini sudah berhasil dilakukan pada tahun 2016 kemarin.

2. Disektor perikanan, untuk program para nelayan di desa penaso masyarakat setempat dibina untuk bagaimana menangkap bibit ikan yang baik agar dapat dipanen pada waktu yang sesuai target, dan hasil ikan yang dapat dipanen pada waktu yang sesuai target, dan hasil ikan yang didapat adalah ikan – ikan yang layak jual, serta masyarakat setempat dibina bagaimana menggunakan pelet makanan ikan yang ramah diligkungan.

Pada pemanfaatan dananya masih terdapat keterlambatan yang dapat dilihat dari perkembangan usaha yang dijalankan oleh masyarakat desa Kuala Penaso. Sedangkan jika kita lihat dari 584 jumlah kepala keluarga masyarakat setempat yang ada di Desa Dusun Jiat, jika ditarik menggunakan data yang diteliti penulis pada kantor Desa dusun jiat, masyarakat yang ikut aktif dalam penyelenggaraan program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa hanya 11 kepala keluarga setempat.

B. Rumusan Masalah

Pemberdayaan merupakan salah satu fungsi pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat agar mampu lebih mandiri serta mensejahterakan kehidupan mereka, maka dari itu instansi masyarakat desa membuat pelaksanaan program pemberdayaan dana desa yang mana tujuan program ini ialah. Meningkatkan kreativitas anggota masyarakat Desa/Kelurahan yang berpenghasilan rendah serta mendorong usaha sector informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Desa/Kelurahan. Dan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian serta menginterpretasikan hasil dari

penelitian, maka terlebih dahulu dirumuskan masalah yang akan dijadikan arahan dan pedoman dalam penelitian. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis?
2. Apa kendala Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui kendala Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis, praktis, maupun kontribusi :

- a. Secara Teoritis

1. Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penelitian maupun pembaca.
2. Mendapat informasi tentang sejauh mana peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan masyarakat desa. Sebagai bahan referensi mahasiswa FISIP khususnya mahasiswa ilmu pemerintah, tentang program penanggulangan kemiskinan atau program daerah pemberdayaan masyarakat.
- b. Secara praktis
Diharapkan dari penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pembangunan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.
- c. Secara Kontribusi
 1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan.
 2. Sebagai sarana menambah ilmu pengetahuan bagi penulis, khususnya pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
 3. Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi penelitian lainnya yang berminat membahas masalah ini lebih lanjut tentang permasalahan yang sama di masa yang akan datang.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep – konsep atau teori – teori yang ada relevansinya untuk pendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori – teori yang digunakan merupakan rangkainya penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

1. Konsep Pemerintahan

Menurut Syafii'e (2003 : 18) pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan.

Apabila ditinjau dari definisi pemerintah (Syaiie, 2005: 20) mengemukakan bahwa pemerintah berasal dari pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki dua unsur yaitu: ada dua pihak yang terkandung, kedua tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memiliki kewenangan dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Menurut Munaf (2016:47) pemerintahan dalam paradigma lama memiliki obyek material negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan,

namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara

Selanjutnya Sedarmayanti (2004: 9) menyatakan bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menaati kedaulatan rakyatnya, oleh karena itu, tugas pemerintahan adalah:

- a. Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa

Menurut Munaf (2016:33), sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih berdasarkan UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru.

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
- b. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
- c. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.

- d. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden
- e. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
- f. Kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

2. Pemerintahan Desa

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No, 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rauf & Maulidiah (2015:19) mengatakan desa di Indonesia pada umumnya memiliki suatu bentuk pemerintahan yang disebut dengan pemerintah desa, pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengertian tentang Pemerintah Desa dinyatakan, yakni: “Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih lanjut Rauf & Maulidiah (2015:19) mengatakan bahwa berdasarkan pengertian dan konsep tentang pemerintah desa seperti tersebut di atas, maka perlu dipahami beberapa hal yang terkait tentang desa tersebut, yakni:

- 1) Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah
- 2) Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat
- 3) Pemerintah desa berada dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rauf & Maulidiah, 2015:19)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada Pasal 1 ayat (3), bahwa “Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintah desa.” Berdasarkan pengertian tentang pemerintahan desa tersebut, maka terkait dengan unsur pemerintahan desa perlu untuk dipahami beberapa hal dari pengertian tersebut, yakni sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 2) Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain
- 3) Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa
- 4) Pemerintah desa disebut dengan unsur penyelenggara pemerintah desa (Rauf & Maulidiah, 2015:20)

Meurut Wasistiono dan Tahir dalam Rauf & Maulidiah (2015:21) bahwa pemerintah desa yang diberi kepercayaan oleh masyarakat tidak hanya cukup mempunyai kewenangan untuk berbuat lebih banyak. Kedudukan dan bentuk organisasinya bersifat mendua (ambivalen), yaitu bentuk organisasi

pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan, tidak adanya sumber pendapatan yang memadai, keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut isi rumah tangganya, keterbatasan kualitas dan kuantitas personilnya, merupakan bagian kendala yang menghambat kinerja pemerintah desa.

3. Kebijakan

Winarno (2012: 19) secara umum, istilah “*kebijakan*” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang actor (misalnya seorang pejabat, suatu keadaan kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Sedangkan Desa menurut R.Bintarto merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, social, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain, dengan kata lain kebijakan desa adalah suatu pemutusan kebijakan untuk suatu permasalahan baik itu permasalahan politik desa, maupun permasalahan yang mengenai desa tersebut.

Kebijakan desa sudah di atur dalam Perundang – undangan No. 6 Tahun 2014 baik itu kebijakan mengenai alokasi dana desa maupun kebijakan desa, wewenang desa dipegang penuh oleh kepala desa.

Dye atau Awang (2010: 19) menyatakan bahwa kebijakan public adalah apapun yang dipilih oleh pemerintahan untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Selanjutnya Dunn dalam dalam Awang (2010: 63-64) kebijakan public dapat juga merupakan serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor

pemerintah, diformulasikan dalam bidang-bidang (*issue areas*), yaitu arah tindakan actual atau potensial dari pemerintah yang didalamnya terkandung konflik diantara kelompok masyarakat.

Beberapa konsep kebijakan public diatas pada dasarnya memandang kebijakan public sebagai tujuan untuk memenuhi tuntutan actor kebijakan. Hal yang sama dikemukakan oleh Wahab dalam Awang (2010: 26) yaitu serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seseorang actor politik atau sekelompok actor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara mencapainya dalam situasi dimana keputusan – keputusan ini pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari pada actor tersebut.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparaturnya pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. (Kansil dan Cristie, 2003: 190). Kebijakan public menurut Dye (dalam Agustino, 2008: 7) adalah apa yang dipilih oleh pemerintahan untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Rose (dalam Agustino, 2008: 7) kebijakan public sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.

Menurut Dunn (2001: 105) perumus kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna di manfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah:

1. Pengolahan informasi yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Penetapan alternative – alternative, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan penilaian yang dimiliki oleh badan instansi tersebut sebagai badan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
4. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh penbuatan kebijakan.

Ndraha (2003: 98) Kebijakan pemerintah adalah sebagai pilahan terbaik, usaha untuk menilai pemerintah yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan meningkat secara formal, etik dan moral, diarahkan guna menepati pertanggung jawaban di dalam lingkungan pemerintah.

4. Konsep Implementasi

Implementasi menurut Syauckani dkk (2002: 293) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut membawa hasil sesuai yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama, persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, penyiapan sumberdaya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumberdaya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana

menghantarkan kebijaksanaan secara konkret ke masyarakat. Menurut Nugroho (2006: 494) implementasi desa pada prinsipnya adalah agar sebuah kebijakan desa, dapat terealisasi secara nyata di desa, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasi dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Winter (dalam Nugroho, 2007: 83) mengidentifikasi empat variabel kunci yang mempengaruhi implementasi desa yaitu (1) proses formulasi kebijakan, (2) perilaku organisasi dan pelaku implementasi, (3) perilaku birokrat pelaksana ditingkat bawah, dan (4) respon kelompok target kebijakan dan perubahan dalam masyarakat.

Menurut Moenir (2004: 25) Implementasi desa merupakan penerapan dari pada kebijakan yang telah diambil oleh suatu badan/seseorang dalam organisasi. Kemudian menurut Mazmanian (dalam Nugroho, 2008: 447) mengatakan implementasi merupakan upaya melaksanakan keputusan kebijakan.

Implementasi juga diartikan dalam kamus Webster dalam wahab, (2005: 50) dengan mengartikan sebagai "mengimplementasikan" yang mempunyai pengertian menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Berdasarkan pandangan ini maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang- undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, pemerintah eksekutif atau drkrit presiden).

Lebih rinci lagi, Mazmainia dan sabartier dalam Wahab (2005: 54) mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan

dasar biasanya dalam bentuk undang- undang dapat pula dalam bentuk perintah - perintah atau keputusan - keputusan itu mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk mengstrukturkan proses implementasi.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada 2 pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program - program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan public tersebut. Nugroho (2003: 158).

Menurut Nogi (2003: 13) Implementasi kebijakan merupakan serangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia - sia.

Lilik Ekawati (2005: 42) menyatakan bahwa definisi implementasi secara *implicit* mencakup tindakan oleh individu atau kelompok privat (swasta) dan public yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini meliputi usaha mentransformasi keputusan dalam tindakan operasional, berusaha mencapai tujuan besar kecil sebagaimana dimandatkan oleh keputusan kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008:39) mendefinisikan implementasi sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individu atau pejabat – pejabat atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan

Keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan/penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak/hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. (Tankilisan, 2004: 9).

Menurut Weimer dan Vining “keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh tiga kelompok besar, yaitu : (1) logika kebijakan; (2) lingkungan tempat kebijakan; (3) implementator kebijakan.” (Subarsono, 2005; 114). Demikian pula menurut Daniel A. Masmanian dan Paul A. Sabatier, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh tiga kelompok variabel, yaitu:

1. Karakteristik dari masalah;
2. Karakteristik kebijakan atau undang – undang
3. Vaeiable lingkungan

Bagitu banyak model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli sehingga kita merasa susah untuk memiliki model implementasi kebijakan yang nama yang paling efektif dipilih dan diterapkan.

Menurut Edward III (dalam Effendy, 2009:86-89) untuk mengukur pengaruh implementasi kebijakan public dapat dipergunakan 4 (empat) variable, yaitu:

a. Komunikasi

Menurut Edwar III (dalam Effendy, 2009: 86-87) ada tiga hal yang penting dalam proses komunikasi yakni: kejelasan, konsistensi, substansi kebijakan harus dipahami oleh para pelaksana dengan sebaik – baiknya. Kebijakan harus dikonikasiakan dengan jelas, akurat dan konsisten.

Menurut Daryanto dan Abdullah (2013:94) komunikasi merupakan penyampaian dan pertukaran informasi sekurang – kurangnya 2 pihak yang berperan sebagai pengirim (sender) dan penerima (receiver) dengan menggunakan berbagai media yang ada. Komunikasi secara lisan, yakni komunikasi dengan menggunakan lisan secara langsung bersamaan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, komunikasi lisan dapat berupa komunikasi formal, misalnya pembicaraan dalam pertemuan atau rapat, maupun informal. Komunikasi tertulis dengan menggunakan mediator sebagai penyampaian pesan. Daryanto dan Abdullah (2013:95).

Keberhasilan mengimplementasi kebijakan masyarakat agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditranmisikan kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dan kelompok sasaran. Mulyadi (2015:68)

b. Sumber daya

Sumber daya merupakan unsur pelaksana yang memiliki peranan yang penting dalam implementasi kebijakan oleh karena itu perlu adanya tenaga yang ahli karena implementasi kebijakan tidak akan efektif jika kerja ditangani oleh orang-orang yang ahli dalam tugas-tugasnya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi

tidak akan terjadi efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah factor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.

c. Disposisi

Dalam implentasi kebijakan tidak boleh terjadi kesenjangan antara pembuat dan implementator kebijakan dan hendaknya diantara keduanya terjalin hubungan yang saling mendukung supaya implementasi kebijakan dapat berhasil dengan baik. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi efektif.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan lembaga yang menjadi pelaksana kebijakan, dimana struktur tergambar jelas kedudukan, pembagian wewenang dan pembagian tugas sesuai bidang kerja masing – masing sesuai dengan fungsi dsar organisasi tersebut. Struktur birokrasi merupakan yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating prosedur*) atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Ada enam variable implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008:142) meliputi : 1. Ukuran dan tujuan kebijakan, 2. Sumber daya 3. Agen pelaksana, 4. Sikap para pelaksan, 5. Komunikasi 6. Lingkungan ekonomi, social dan politik.

5. Pemberdayaan

Proses pemberdayaan masyarakat desa mengandung dua kecenderungan pertama proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagai kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya.

Menurut kartasasmita (1996:23) mengatakan bahwa pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu: pertama menciptakan suasana iklim yang kemungkinan potensi masyarakat berkembang, titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia pemberdayaan desa adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat dan mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi , social, agama, dan budaya. Pemberdayaan mayarakat terutama dipedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktifitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosisal ekonomi masyrakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktifitas dan efisiensi (Widjaja, 2003:169). Kartasasmita (1996; 45) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai – nilai social.

Menurut Sumodiningrat (1999:32), menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan dapat dipandang sebagaibagian atau sejiwa sedarah aliran yang muncul pada paruh abad ke-20 yang lebih dikenal sebagai aliran postmodernisme. Aliran ini menitik beratkan pada sikap dan pendapat yang berorientasi pada jargon antisystem, antisruktur, dan antideterminisme yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan . pemahaman konsep pemberdayaan oleh masing-masing individu secara selektif dan kritis dirasa penting, karena konsep ini mempinyai akar historis dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat. Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dana tau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Unsur-unsur pemberdayaan desa pada umumnya adalah: (1) inklusi dan partisipasi; (2) akses pada informasi; (3) kapasitas organisasi lokal; dan profesionalitaspelaku pemberdayaan. Keempat elemen ini terkait satu sama lain dan saling mendukung. Inklusi berfokus pada bagaimana merka diberdayakan, sedangkan partisipasi berfokus pada bagai mana mereka diberdayanakan dan peran apa yang mereka mainkan setelah merka menjadi baguan dari kelompok yang diberdayakan. Unsur kedua, akses pada informasi, adalah aliran informasi yang tidak tersumbat antara masyarakat dengan masyarakat lain dan antara masyrakat dengan pemerintah, hak dan kewajiban dalam masyarakat, ketentuan tentang pelayanan umum, dan lain sebagainya.

6. Masyarakat Desa

Pengertian masyarakat pedesaan atau desa, dua kata yang mempunyai arti tersendiri, untuk mendapatkan pengertian dari dua kata ini harus diartikan terlebih dahulu kata perkata. Misalnya masyarakat diartikan golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh – mempengaruhi satu sama lain.

Soetarjo dan Yulianti dalam Tahir (2007: 7) Kata desa sendiri berasal dari bahasa India yakni "swadesi" yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Sedangkan menurut Beratha dalam Nurcolis (2011: 4) desa atau nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu "badan hukum" dan adalah pula "badan pemerintahannya". Yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Bintarto dan Wasistiono dalam Tahir (2007:8) yang memandang desa dari segi geografi, mendefinisikan desa sebagai: "suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis, dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain".

Nurcholis (2011: 4) menyimpulkan desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan

kekerabatan dan/ kepentingan politik, social, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat, umumnyaarganya hidup dari pertanian, mempunyai kesatuan masyarakat, umumnyaarganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangganya sendiri dan secara administrasi berada dibawah pemerintahan Kabupaten/Kota. Pandangan tentang kedua kata diatas yaitu masyarakat desa dapat diartikan sebagai masyarakat yang memiliki hubungan yang lebih mendalam dan erat dan system kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Sebagian besar masyarakat hidup dari pertanian.

Masyarakat desa selalu memiliki ciri –ciri atau dalam hidup bermasyarakat biasanya tampak dalam perilaku kebiasaan mereka. Pada kondisi dan situasi tertentu, sebagian karakteristik masyarakat desa ditandai dengan perasaan setiap warga/ anggota masyarakat yang amat kuat.

7. Pembangunan

Konsep pembangunan biasanya melekat dengan konteks kajian suatu perubahan. Pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan, setiap orang atau kelompok orang tertentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih sempurna, untuk mewujudkan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai usaha yang lebih rasional bagi masyarakat desa (Subandi:2011:9-11)

Adapun pembangunan menurut para ahli yaitu:

Awang (2006:59) bahwa otonomi telah menjadi kata kunci di dalam proses pergeseran orientasi pembangunan sekaligus orientasi hubungan kekuasaan antar daerah dan pusat. Otonomi karenanya merupakan suatu pernyataan derajat “kebebasan” suatu daerah terhadap pusat didalam pengelolaan sumber daya (alam dan manusia) secara lebih efektif bagi pembangunan itu sendiri, tetapi juga bagaimana pengelolaan ini dapat merupakan bentuk suatu system yang dapat menjadi basis bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Lebih jauh, Korten dalam Awang (2006:60) mengemukakan bahwa tuntutan semacam ini tidak dapat terpenuhi tanpa adanya dukungan dari masyarakat yang menjadi objek atau subjek pembangunan itu sendiri.

Selanjutnya abdullah dalam awang (2006:59) menjelaskan bahwa keterlibatab dalam proses perencanaan pembangunan hingga proses oelaksanaan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh persoalan apakah pembangunan itu bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga oleh pernyataan apakah masyarakat dilibatkan dalam usaha peningkatan kesejahteraan (sosial, ekonomi, politik) terhadap diri mereka.

Pembangunan desa pada hakekat adalah suatu transformasi masyarakat dari suatu keadaan pa keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat pedesaan yang dicita-citakan masyarakat. Dalam proses transformasi ini ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu berkelanjutan dalam pembangunan desa dan perubahan dalam pembangunan desa. Tarikan kedua hal ini menimbulkan dinamika dalam perkrmbangan masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

No	NAMA	JUDUL	TEORI	INDIKATOR
1	2	3	4	5
1	Asrul Nurdin	Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Pekanbaru	Implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta. Yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya. (Budi Winarno, 2002:13)	1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi 4. Kemiskinan 5. Kondisi Sosial
2	Puji Meilita	Implementasi Kebijakan Penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi kelompok usaha bersama (KUBE) di Jakarta	Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan public secara sempurna (perfect implementation) maka diperlukan beberapa syarat , yaitu: 1) kondisi eksternal, 2) waktu dan sumber-sumber memadai, 3) sumber yang benar ada.	1. Implementasi 2. Kebijakan 3. Pendidikan 4. Kemiskinan 5. Pemberdayaan

C. Kerangka Pikir

Dari fenomena – fenomena yang penulis temukan dilapangan kemudian mengacu kepada teori yang dijadikan konsep penelitian tentang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari reorientasi, gerakan social,

institusi lokal dan pengembangan kasitas maka penulis akan menggambarkan bagaimana pemahaman penulis dalam kerangka piker yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Kuala Pesano Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.



D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan untuk menertralisir kesalah pahaman dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk mengoperasionalkan konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

- a. Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso adalah pembagian wilayah dministratif dibawah Kabupaten Bengkalis.

- b. Pemberdayaan masyarakat ialah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan program-program yang telah disusun sehingga masyarakat dapat menjadi lebih mandiri dengan bantuan dari pemerintah.
- c. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa merupakan suatu program dan lembaga yang terdapat pada desa dengan memiliki kegiatan mengelola dana usaha yang digunakan desa untuk mensejahterakan masyarakat desa itu sendiri baik secara perorangan maupun kelompok.
- d. Implementasi atau pelaksanaan kebijakan ialah usaha pemerintah dalam melaksanakan suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dengan melihat komunikasi untuk pembayaran informasi, sumberdaya pelaksana, pemberian pemerintah dan struktur organisasi.
- e. Komunikasi yaitu penyampaian informasi pada setiap masyarakat yang ada di wilayah kerja Dinas mengenai program bantuan sosial yang akan dilaksanakan.
- f. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama dan berinteraksi dalam bekerja sama guna memperoleh kepentingan untuk bersama.
- g. Sumberdaya kebijakan adalah ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan. Termasuk Sumber daya manusia dan Dana dalam pelaksanaan program.

- h. Disposisi yaitu sikap pelaksana dalam melaksanakan program bantuan sosial serta bagaimana sikap masyarakat dalam menanggapi program yang dijalankan.
- i. Struktur birokrasi merupakan mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri struktur birokrasi merujuk kepada mekanisme implementasi program dan prosedur pelaksanaan program tersebut.

E. Operasional Variabel

Operasional variabel adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dan juga mengenai indikator serta item penilaian sebagai suatu batasan dari penelitian, operasional variable dalam hal ini disajikan dalam bentuk table yang berisi konsep, variable, indcator, itemvpenilaian dan skala dirancang untk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Maka dibuatlah tabel operasional yang dapat dilihat dibawah ini.

Table II. 1 Operasional Variabel Implementasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Pesano Kecamatan Bengkalis

Konsep	Variabel	Indicator	Item Penilaian	Skala
Kebijakan public adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-	Implementasi	1. Komunikasi	1. kemudahan Memberikan arahan akan Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada masyarakat. 2. Mudahnnya masyarakat setempat dalam menjalankan program	Ordinal

kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”. Carl Federich (dalam Agustino, 2008:7)			Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
		2. Sumber daya	1. Terpenuhinya kebutuhan Ekonomi masyarakat setempat 2. Terbentuknya keterampilan masyarakat setempat	Ordinal
		3. Stuktur birokrasi	1. Terbangunnya fasilitas organisasi untuk masyarakat yang butuh 2. Terpelihara keanggotaan secara umum dan social	Ordinal
		4. Disposisi	1. Keberlanjutan infrastruktur 2. Pemanfaatan insfrastuktur terbangun	ordinal

Sumber : Modifikasi Penulis, 2017

F. Teknik Pengukuran

Kategori pengukuran dalam penelitian ini adalah Terimplementasi, kurang terimplementasi, Tidak terimplementasi.

Terimplementasi :Apabila semua indicator dapat dilaksanakan.

67-100%

Kurang Terimplementasi :Apabila hanya sebagian indicator dapat dilaksanakan.

34-66%

Tidak Terimplementasi :Apabila tidak melaksanakan semua indicator.>33%

A. Masyarakat Dilokasi Sasaran Mempunyai Akses

Terimplementasi :Apabila semua indikator dapat dilaksanakan. 67 - 100%

Kurang Terimplementasi :Apabila hanya sebagian indikator dapat dilaksanakan.34 – 6

Tidak Terimplementasi : apabila tidak melaksanakan semua >33%

B. Terbangun dan terpeliharanya Infrastruktur

Terimplementasi :Apabila semua indikator dapat dilaksanakan. 67 - 100%

Kurang Terimplementasi :Apabila hanya sebagian indicator dapat dilaksanakan. 36 - 66%

Tidak Terimplementasi :Apabila tidak melaksanakan semua indikator.>33%

C. Terbentuknya Organjsasi Pengelola Yang Bertanggung Jawab

Terimplementasi :Apabila semua indikator dapat dilaksanakan. 67 - 100%

Kurang Terimplementasi :Apabila hanya sebagian indicator dapat dilaksanakan. 34 - 66%

Tidak Terimplementasi :Apabila tidak melaksanakan semua indikator.>33%

D. Memenuhi 4T

Terimplementasi :Apabila semua indikator dapat dilaksanakan. 67 - 100%

Kurang Terimplementasi :Apabila hanya sebagian indicator dapat dilaksanakan. 34 - 66%

Tidak Terimplementasi :Apabila tidak melaksanakan semua indikator.>33%

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah- langkah sistematis. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Winarno Surakhmad (1985:151) yaitu : “Metode penelitian merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis, dengan mempergunakan teknik serta alat-alat tertentu. Cara utama ini dipergunakan setelah penyelidikan memperhitungkan kewajarannya ditinjau dari tujuan penyelidikan dan situasi penyelidikan”.

Dalam bab ini diuraikan secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegunaan penelitian yang meliputi penentuan variable pokok, penentuan populasi, penentuan sampel atau teknik pengambilan contoh, metode dan teknik pengumpulan data, instrument penelitiannya, dan teknik analisis data dalam Husaini dan Purnomo Setriady Akbar (2009:41)

A. Tipe Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang diteliti, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Masyhuri (2008:34) menjelaskan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Sedangkan metode penelitian kuantitatif yang dijelaskan oleh sugiyono (2011:14) :

Metode penelitian sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme : metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu; teknik pengambilan sampel biasanya dilakukan dengan perhitungan teknik sampel tertentu yang sesuai; pengumpulan data kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan dilakukan dengan survey dengan menggunakan metode kuantitatif.

Sedangkan penggunaan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif ini diselaraskan dengan variable penelitian yang memusatkan pada masalah-masalah actual dan fenomena yang terjadi pada saat sekarang dengan bentuk hasil penelitian berupa angka-angka yang bermakna. Sebagaimana dikemukakan oleh nana sudjana (1997:53) bahwa : “Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif digunakan apabila bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa atau suatu kejadian yng terjadi pada saat sekarang dalam bentuk angka-angka yang bermakna.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Desa kuala penaso Kecamatan Pinggur kabupaten bengkalis, adapun pemilihan lokasi penelitian dikarenakan penelitian melihat aparat desa kurang baik dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, terlebih dalam mengelola biaya pembangunan pemberdayaan masyarakat desa yang diberikan pemerintah setempat.

C. Populasi Dam Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generialisasi yang terdiri dari atas : obyek - obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Adapun yang menjadi populasi untuk diwawancarai pada penelitian ini adalah : Kepala Desa yaitu (Bosniar), BPD 1.(Dedi Aditama selaku Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan), BPD2. (Haryanto selaku Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa), BPD 3 (Mena selaku Sub Usaha Ekonomi Desa) , Sekretaris Desa (Abdul Bakar), Kaur pembangunan (Sucipto), dan populasi yang disebarakan angket dalam penelitian ini adalah Kepala Keluarga yang terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat desa.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel dari Kepala Keluarga menggunakan teknik *sampling purposive*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Untuk lebih jelas, berikut penulis paparkan table berikut ini:

Table III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

No	Nama Populasi	Populasi (orang)	Sampel (orang)	Persentase (%)
1	Kepala Desa	1	1	100
2	BPD	3	3	100
3	Sekretaris Desa	1	1	100
4	Kaur pembangunan	1	1	100

5	Kepala Keluarga	584	11	2
Jumlah		590	17	-

Sumber : Kantor Kepala Desa Kuala Penaso 2017

D. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini Kepala Desa, Sekretaris Desa, kaur pembangunan BPD menggunakan teknik sensus, kepala keluarga, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.

Sementara proses penarikan sampel untuk Kepala Keluarga menggunakan teknik sampling purposive yaitu dengan pertimbangan bahwa responden yang di tunjuk mengetahui secara memahami masalah dan tujuan penelitian ini.

E. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan maka data yang diperlukan antara lain:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui penelitian lapangan, baik berupa informasi dari wawancara maupun kuisioner. Dalam hal ini data primer yang dibutuhkan adalah data tentang implementasi peraturan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah an daerah dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah tentang pedoaman masyarakat dapat menggunakan dana Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun teknik dokumentasi dengan memanfaatkan sumber-sumber data yang dapat menunjang obyek yang diteliti berupa sejarah desa kuala penaso, keadaan Geografis, Keadaan penduduk, Luas Wilayah, Tingkat pendidikan dan struktur organisasi pemerintah desa kuala penaso kecamatan pinggir kabupaten bengkalis.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan yang telah disusun yang berisikan pertanyaan yang harus dijawab oleh responden menyangkut hal-hal yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Kuisioner

Yaitu mengumpulkan data dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan yang telah disusun yang berisikan pertanyaan yang harus dijawab oleh responden menyangkut hal-hal yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk fenomena awal penelitian.

G. Teknik Analisi Data

Metode analisa yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa deskriptif dan kuantatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan berdasarkan kondisi yang ada dilapangan penelitian. Selanjutnya data yang didapatkan, dikumpulkan dan diklasifikasikan melalui kuisioner menurut jenisnya kemudian diolah kedalam tabel, setelah itu diuraikan dan kemudian diberikan pembahasan sekaligus pengujian hipotesis.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kecamatan Pinggir

Kecamatan Pinggir merupakan salah satu Kecamatan pemekaran dari Kecamatan Mandau yang sudah diresmikan tepatnya pada tanggal 24 Oktober 2003 oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dan Kerjasama Direktorat Jenderal Administrasi Bina Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Sebelum menjadi kecamatan pusat pemerintahan terletak di Duri, berdasarkan PP No.129 Tahun 2000 ada beberapa tujuan dibentuknya sebuah daerah baru atau dilakukannya pemekaran daerah. Tujuan tersebut diantaranya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan masyarakat, mempercepat pertumbuhan demokrasi, mempercepat pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, mempercepat pengelolaan potensi daerah, meningkatkan keamanan dan ketertiban, meningkatkan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dengan menjadi daerah otonom maka pelayanan masyarakat menjadi lebih dekat dan memiliki anggaran yang dikelola sendiri yang dapat digunakan wilayah tersebut.

Pemekaran Kecamatan Pinggir membuka lapangan kerja, serta pembangunan infrastruktur lainnya, terbentuknya otonomi daerah akan menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Karena semakin dekatnya pusat pemerintahan daerah dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.

1. Profil Desa Kuala Penaso

Desa kuala penaso merupakan salah satu desa masuk kedalam kecamatan pinggir, dengan luas wilayah 230 km², yang mempunyai topografi yang termasuk datar. Desa kuala penaso mempunyai jumlah 2 dusun, 5 RW dan 13 RT. Untuk jumlah penduduk(jiwa) pada tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1) 45800 orang laki-laki; 2) 43357 orang perempuan, dengan jumlah 89157 orang(jiwa) dengan pertumbuhan penduduk 1,34% .

Banyaknya sekolah di desa Kuala Penaso sebagai berikut: 1) Jumlah sekolah dasar 2 (unit) dengan jumlah murid 406 orang dan jumlah guru 21 orang ; 2) jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1(unit) dengan jumlah murid 147 orang dan jumlah guru 6 orang, untuk Sekolah Menengah Atas belum ada. Fasilitas kesehatan terdapat 1(satu) Polindes (Pondok Bersalin Desa) dan 2 Posyandu dan tenaga kesehatan hanya 2 bidan. Kemudian untuk potensi pertanian di desa kuala penaso adalah sebagai berikut: 1) karet ; 2) kelapa sawit ; 3) kelapa ; 4) pinang, dengan luas panen kebun sebagai berikut: 1) kebun karet 35 hektar, 2) kebun kelapa sawit 671hektar, 3) kebun kelapa 4hektar, 4) kebun pinang 6hektar. Potensi perikanan adanya budidaya ikan kolam berbagai jenis ikan.

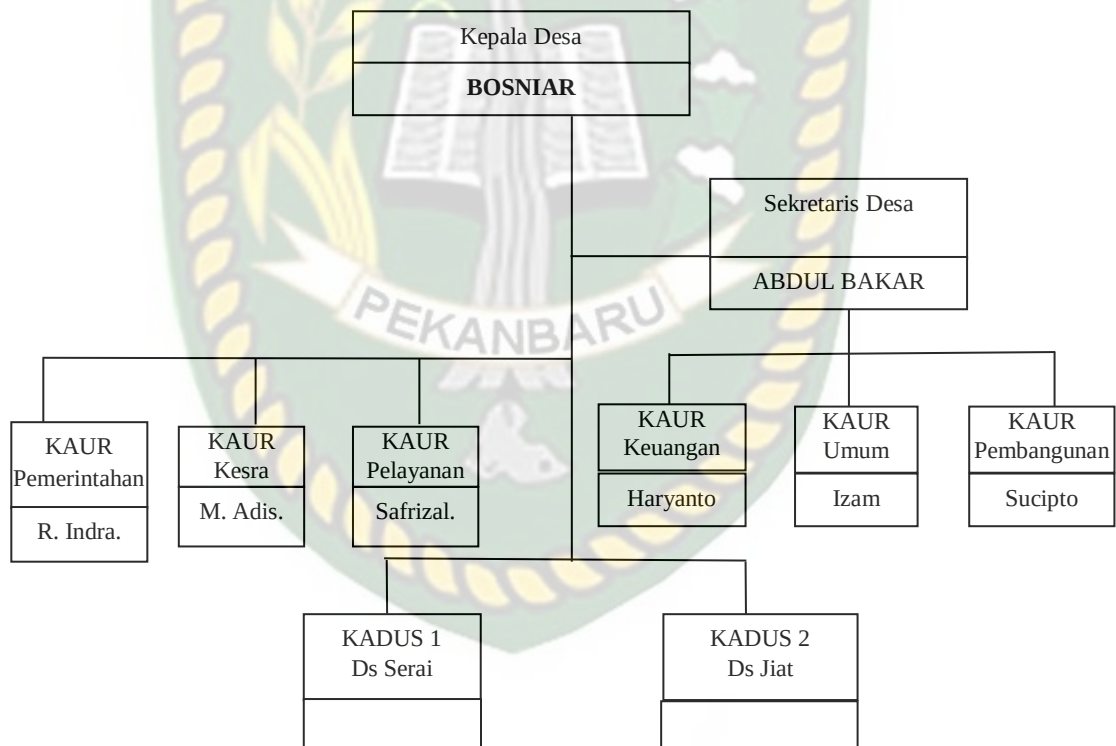
Untuk jumlah industri dan perdagangan diwakili dengan industri mikro dengan jumlah sebanyak 9, fasilitas perdagangan terdapat 1 pasar, 3 toko(warung kelontong) dan 1 warung/kedai makanan dan minuman.

Kemudian untuk jumlah fasilitas keuangan desa kuala penaso mempunyai 1 koperasi.

2. Struktur Organisasi Pemerintahan desa Kuala Penaso

Berikut adalah struktur organisasi pemerintahan desa Kuala penaso Kecamatan Pinggir:

**Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan
 Desa Kuala Penaso Kecamatan Pinggir
 Tahun 2018**



Sumber : Kantor Desa Kuala Penaso

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara mengenai pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat desa di kecamatan pinggir desa Kuala Pesano Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Responden yang diwawancarai adalah Kepala Desa yaitu (Bosniar), dari BPD : 1.(Dedi Aditama selaku Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan), 2(Haryanto selaku Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa)3. (Mena Selaku Sub Usaha Ekonomi Desa) , 4. S ecretaris Desa (Abdul Bakar), 5. Kaur pembangunan (Sucipto).

Indikator pertanyaan wawancara adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Masing-masing indikator tersebut dikembangkan menjadi item yang dinilai, meliputi: (1) kemudahan Memberikan arahan akan Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada masyarakat; (2) Mudahnya masyarakat setempat dalam menjalankan program Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa; (3) Terpenuhinya kebutuhan Ekonomi masyarakat setempat; (4) Terbentuknya keterampilan masyarakat setempat; (5) Terbangunnya fasilitas organisasi untuk masyarakat yang butuh; (6) Terpelihara keanggotaan secara umum dan sosial; (7) Keberlanjutan infrastruktur; dan (8) Pemanfaatan infrastruktur terbangun.

B. Hasil Penelitian tentang Implementasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis

Adapun hasil dari observasi awal yang dilakukan peneliti guna melihat dan memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian adalah. Peneliti melakukan observasi dengan mengamati atau meninjau langsung secara cermat lokasi penelitian dan menggunakan rekaman. Hasil observasi yang didapat dari lapangan adalah benar bahwasanya dana pemerintah yang diperoleh pemerintah daerah setempat tidak terealisasi sebagaimana mestinya yang telah diatur oleh pemerintah, baik itu dalam infrastrukturnya maupun pemberdayaan masyarakatnya. Oleh karena hasil observasi tersebut, penelitian dapat dilanjutkan lebih mendalam untuk membuktikan hasil dari observasi awal yang telah dilakukan.

C. Hasil Penelitian tentang Implementasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis

Adapun hasil wawancara terhadap keenam responden yang meliputi empat poin indikator dari implementasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis yang dijumpai, kesimpulan yang didapat dari wawancara adalah kurang terimplementasinya pembangunan pemberdayaan masyarakat di desa tersebut, lebih didominasi oleh

kurangnya sumberdaya setempat yang mempunyai pemahaman. Baik dari keahlian maupun pendidikannya, dan diikuti oleh kurangnya komunikasi pemerintah setempat untuk menjelaskan kepada masyarakat. selanjutnya yang juga mempunyai hubungan dengan kurang terimplementasinya pembangunan pemberdayaan masyarakat perindikator diperoleh hasilnya sebagai berikut.

1. Komunikasi

Permasalahan pertama terkait dengan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah d desa dalam Implementasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis. Sejalan dengan Komunikasi menurut Edward III (2006: 157) yaitu komunikasi merupakan salah satu variabel penting yng mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Begitupun menurut Winarno (2005: 128) Faktor-faktor yang mendorong ketidakjelasan informasi dalam implementasi kebijakan publik biasanya karena kompleksitas kebijakan, kurangnya consensus kebijakan publik. Wawancara terkait Komunikasi meliputi bagaimana pemerintah daerah memberikan kemudahan pesan atau arahan akan Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat yang ada, dan bagaimana caranya program Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa yang akan dijalankan mudah dipahami masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kuala Penaso, Bapak Bosniar diperoleh jawaban bahwa:

Kami memiliki pertemuan rutin yang ikuti oleh perangkat desa dengan masyarakat untuk memberikan pengumuman atau

membahas permasalahan yang ada di desa. Biasanya kami bentuk panitia atas program yang akan di laksanakan, anggotanya terdiri dari beberapa orang dari perangkat desa dan sisanya beberapa orang dari masyarakat jadi biasanya kalau ada sesama warga jadi lebih mudah di pahami (Hasil Wawancara Tanggal 11 Desember 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa kemudahan pesan atau arahan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat terkait PPMD adalah dengan melakukan pertemuan rutin antara perangkat desa dan masyarakat. Tujuan pertemuan adalah untuk memberikan pengumuman atau membahas permasalahan yang ada di desa. Sedangkan cara agar program PPMD dapat mudah dipahami masyarakat, maka dibentuk panitia atas program PPMD yang mana anggotanya juga terdiri dari masyarakat, sehingga anggota dari masyarakat tersebut dapat menjelaskannya kepada masyarakat lainnya. Kemudian, BPD 1, Bapak Dedi mengatakan bahwa:

Biasanya pihak desa mengadakan rapat rutin jadi disitu bisa didengar keluhan kesah masyarakat dan kebijakan baru dari desa. Anggota panitia ada dari kalangan masyarakat supaya lebih transparan dan mudah dipahami juga (Hasil Wawancara Tanggal 16 Desember 2019).

Dikatakan bahwa kemudahan pesan atau arahan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat terkait PPMD adalah dengan mengadakan rapat rutin untuk mendengar keluhan kesah masyarakat dan kebijakan baru dari desa. Sedangkan cara agar program PPMD dapat mudah dipahami masyarakat, maka dibentuk panitia atas program PPMD dengan keanggotaan dari kalangan masyarakat agar lebih transparan dan

mudah dipahami masyarakat. Kemudian jawaban wawancara dari BPD 2,

Bapak Haryanto mengatakan bahwa:

Melalui pertemuan desa maupun rapat-rapat desa yang mengikutsertakan masyarakat dan biasanya juga adanya papan pengumuman singkat yang ada di kantor desa. Masyarakat di beri penjelasan atau pengenalan program jadi masyarakat tidak kaget atau bingung (Hasil Wawancara Tanggal 16 Desember 2019).

BPD 2, Bapak Haryanto mengatakan bahwa kemudahan pesan atau arahan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat terkait PPMD adalah dengan pertemuan desa maupun rapat-rapat desa yang mengikutsertakan masyarakat, dan adanya papan pengumuman singkat yang ada di kantor desa. Sedangkan cara agar program PPMD dapat mudah dipahami masyarakat, maka masyarakat diberi penjelasan atau pengenalan program oleh aparat desa. Selanjutnya jawaban wawancara dari BPD 3, Bapak Mena mengatakan bahwa:

Masyarakat di undang untuk hadir di pertemuan rutin perangkat desa jadi lebih transparan dan bisa mudah menyebarluaskan pesan atau arahan. Program yang di buat adalah program yang dibutuhkan oleh masyarakat jadi masyarakat lebih mudah paham karena itu yang mereka mau sebenarnya (Hasil Wawancara Tanggal 17 Desember 2019).

BPD 3, Bapak Mena mengatakan bahwa kemudahan pesan atau arahan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat terkait PPMD adalah dengan mengundang masyarakat. Sedangkan cara agar program PPMD dapat mudah dipahami masyarakat adalah dengan membuat program sesuai kebutuhan masyarakat. Hasil wawancara dengan Sekretaris desa, Bapak Abdul Bakar adalah:

Kami adakan pertemuan rutin dengan masyarakat setiap bulannya dan kami tampilkan di papan pengumuman singkat yang ada di kantor desa. Program yang di buat adalah program yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dari segi panitianya kami ambil sebagian dari masyarakat sehingga masyarakat akan mudah memahami baik dari segi kegunaan program maupun dari pelaksanaannya (Hasil Wawancara Tanggal 11 Desember 2019).

Sekretaris desa Bapak Abdul Bakar mengatakan bahwa kemudahan pesan atau arahan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat terkait PPMD adalah melakukan pertemuan rutin dengan masyarakat. Sedangkan cara agar program PPMD dapat mudah dipahami masyarakat adalah dengan menjadikan sebagian masyarakat menjadi panitia PPMD. Sedangkan hasil wawancara dengan Kaur pembangunan Bapak Sucipto adalah:

Pengumuman diberikan saat pertemuan rapat sehingga kami bisa tau tanggapan dari masyarakat. Kami perkenalkan melalui perangkat kami yang memiliki keahlian di bidang program tersebut (Hasil Wawancara Tanggal 12 Desember 2019).

Kaur pembangunan Bapak Sucipto mengatakan bahwa kemudahan pesan atau arahan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat terkait PPMD adalah dengan memberikan pengumuman saat rapat pertemuan dengan masyarakat. Sedangkan cara agar program PPMD dapat mudah dipahami masyarakat adalah dengan memperkenalkannya dengan masyarakat melalui perangkat desa yang ada.

Berdasarkan hasil jawaban sebaran kuesioner penelitian tentang Implementasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis diperoleh bahwa indikator sumberdaya menjadi faktor utama yang membuat kurang

terimplementasinya pembangunan pemberdayaan masyarakat desa. Data tersebut dapat kita lihat perindikator dimulai dari hasil indikator komunikasi, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.1 Jawaban Kuesioner tentang Implementasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis pada indikator komunikasi

No	Pertanyaan tentang	Jumlah Responden Menjawab Skor (%)				Jumlah
		4	3	2	1	
1	Apakah pemerintah daerah memberikan kemudahan pesan atau arahan akan PPMD kepada masyarakat.	2 (18,18%)	2 (18,18%)	6 (54,55%)	1 (9,09%)	11 (100%)
2	Apakah program PPMD yang akan dijalankan mudah dipahami masyarakat.	1 (9,09%)	5 (45,45%)	5 (45,45%)	-	11 (100%)
3	Masyarakat cepat mengerti akan arahan atau pesan tentang PPMD	2 (18,18%)	7 (63,64%)	2 (18,18%)	-	11 (100%)
Jumlah		5	14	13	1	11
Rata-rata (%)		2 (15,15%)	5 (42,42%)	4 (39,39%)	0 (3,03%)	11 (100%)

Sumber: Data Hasil Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan hasil jawaban kuesioner oleh 11 orang responden (kepala keluarga) dari tabel V.4 diatas tersebut, bahwa rata-rata 2 orang (15,15%) menyatakan sangat setuju, 5 orang (42,42%) menyatakan setuju, 4 orang (39,39%) menyatakan tidak setuju, dan 0 orang (0,33%) menyatakan sangat tidak setuju mengenai implementasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis ditinjau dari aspek komunikasi.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis temukan di lapangan secara langsung, dapat disimpulkan bahwa implementasi pemberdayaan masyarakat tidak terimplementasi karna kurangnya komunikasi dari pihak pemerintah daerah kepada masyarakat, baik itu secara lisan maupun tulisan. Dimana pemerintah setempat kurang dalam melakukan acara rapat atau kegiatan musyawarah kepada penduduk setempat.

Berdasarkan hasil wawancara, kuesioner dan observasi yang dilakukan peneliti terhadap indikator komunikasi, diperoleh kesimpulan bahwa indikator komunikasi sudah terimplementasi sebagaimana tujuan dari indikator komunikasi tersebut. Dimana perangkat desa yang menangani permasalahan program pembangunan pemberdayaan masyarakat sudah melakukan rapat rutin maupun memberikan arahan kepada masyarakat desa.

2. Sumber Daya

Menurut Edward III dalam Agustino (2006: 158-159) sumberdaya merupakan suatu hal yang penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Sejalan dengan pembahasan permasalahan kedua terkait dengan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam Implementasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis. Menurut Tachjan (2006: 135) sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Wawancara terkait sumber daya meliputi apakah semua program PPMD dapat

memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, dan Bagaimana pula membentuk dan mengasah keterampilan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kuala Penaso, Bapak Bosniar diperoleh jawaban bahwa:

Sebetulnya belum karena adanya kendala waktu atau masih berproses dari satu program ke program berikutnya tetapi tujuan kami salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat. Kami berikan pelatihan atau workshop guna meningkatkan keterampilan masyarakat (Hasil Wawancara Tanggal 11 Desember 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa apakah semua program pembangunan pemberdayaan masyarakat desa (PPMD) dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat?, terkait semua program PPMD belum dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat karena adanya kendala waktu atau masih berproses dari satu program ke program berikutnya akan tetapi dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat adalah salah satu tujuan pemerintah desa. Sedangkan membentuk dan mengasah keterampilan masyarakat, maka diberikan pelatihan atau workshop guna meningkatkan keterampilan masyarakat. Kemudian, BPD 1, Bapak Dedi mengatakan bahwa:

Sebenarnya semua program PPMD pasti itu tujuannya tapi kalau sekarang masih dalam bentuk proses. Mereka di beri pelatihan oleh desa (Hasil Wawancara Tanggal 16 Desember 2019).

Dikatan bahwa semua program PPMD dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat adalah tujuannya (pemerintah desa), akan tetapi perlu waktu, saat ini masih dalam proses. Sedangkan cara membentuk dan mengasah keterampilan masyarakat, maka pemerintah desa memberikan

pelatihan. Kemudian jawaban wawancara dari BPD 2, Bapak Haryanto mengatakan bahwa:

Secara tujuan iya karena pemberdayaan berujung pada kesejahteraan ekonomi masyarakat yang terlihat dari peningkatan perekonomian masyarakat. Adanya program pelatihan misalnya dari PKK desa mengadakan keterampilan membuat kerajinan atau memasak makanan yang unik dan bisa di jual (Hasil Wawancara Tanggal 16 Desember 2019).

BPD 2, Bapak Haryanto mengatakan bahwa semua program PPMD dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat adalah tujuannya, karena pemberdayaan berujung pada kesejahteraan ekonomi masyarakat yang terlihat dari peningkatan perekonomian masyarakat. Sedangkan cara membentuk dan mengasah keterampilan masyarakat, pemerintah desa memberikan pelatihan dengan adanya program pelatihan misalnya dari PKK desa mengadakan keterampilan membuat kerajinan atau memasak makanan yang unik dan bisa di jual. Kemudian jawaban wawancara dari BPD 3, Bapak Mena mengatakan bahwa:

Itu memang tujuan dari PPMD. Masyarakat diberi pelatihan yang berguna untuk meningkatkan keterampilan mereka yang bisa di manfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Hasil Wawancara Tanggal 17 Desember 2019).

BPD 3, Bapak Mena mengatakan bahwa semua program PPMD dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat adalah memang tujuannya. Sedangkan cara membentuk dan mengasah keterampilan masyarakat, pemerintah desa memberikan pelatihan yang berguna untuk meningkatkan keterampilan mereka yang bisa di manfaatkan untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian jawaban wawancara dari sekretaris desa Bapak Abdul Bakar mengatakan bahwa:

Kami mengharapkannya seperti itu tapi itu semua tergantung dari masyarakat bagaimana cara mereka memanfaatkannya. Kami berikan mereka pelatihan dan keterampilan misalnya keterampilan membuat kue atau makanan lainnya yang bisa di pergunakan untuk berjualan dan dapat membantu perekonomian keluarga mereka (Hasil Wawancara Tanggal 11 Desember 2019).

Sekretaris desa Bapak Abdul Bakar mengatakan bahwa semua program PPMD dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat adalah harapan pemerintah desa itu tapi itu semua tergantung dari masyarakat bagaimana cara mereka memanfaatkannya. Sedangkan cara membentuk dan mengasah keterampilan masyarakat, pemerintah desa memberikan pelatihan dan keterampilan misalnya keterampilan membuat kue atau makanan lainnya yang bisa di pergunakan untuk berjualan dan dapat membantu perekonomian keluarga mereka. Kemudian jawaban wawancara dari Kaur pembangunan, Bapak Sucipto mengatakan bahwa:

Mungkin secara langsung tidak tapi secara tidak langsung iya seperti pembangunan jembatan. Diadakan pelatihan yang berisikan keterampilan sesuatu yang berguna untuk masyarakat (Hasil Wawancara Tanggal 12 Desember 2019).

Kaur pembangunan, Bapak Sucipto mengatakan bahwa semua program PPMD dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat mungkin secara langsung tidak, tapi secara tidak langsung iya seperti pembangunan jembatan yang merupakan prasarana transportasi. Sedangkan cara membentuk dan mengasah keterampilan masyarakat, agar diadakan

pelatihan yang berisikan keterampilan sesuatu yang berguna untuk masyarakat.

Berdasarkan hasil jawaban sebaran kuesioner penelitian tentang Implementasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis pada indikator sumber daya, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.2 Jawaban Kuesioner tentang Implementasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis pada indikator sumber daya

No	Pertanyaan tentang	Jumlah Responden Menjawab Skor (%)				Jumlah
		4	3	2	1	
1	Apakah semua program PPMD dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.	-	4 (36,36%)	6 (54,55%)	1 (9,09%)	11 (100%)
2	Program PPMD dapat membentuk dan mengasah keterampilan masyarakat	3 (27,27%)	4 (36,36%)	4 (36,36%)	-	11 (100%)
3	Program-program yang ada di PPMD dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dan dapat bersaing dengan sumber daya manusia lainnya	-	6 (54,55%)	3 (18,18%)	2 (18,18%)	11 (100%)
Jumlah		3	14	13	3	11
Rata-rata (%)		1 (9,09%)	5 (42,42%)	4 (39,39%)	1 (9,09%)	11 (100%)

Sumber: Data Hasil Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan hasil jawaban kuesioner oleh 11 orang responden (kepala keluarga) dari tabel V.5 diatas tersebut, bahwa rata-rata 1 orang (9,09%) menyatakan sangat setuju, 5 orang (42,42%) menyatakan setuju, 4 orang (39,39%) menyatakan tidak setuju, dan 1 orang (9,09%) menyatakan sangat tidak setuju mengenai implementasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis ditinjau dari aspek sumber daya.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan secara langsung, observasi yang ada dapat disimpulkan bahwa indikator sumber daya menjadi faktor utama yang menyebabkan kurang terimplementasinya pembangunan pemberdayaan tersebut. Dikarenakan kurangnya keahlian masyarakat baik itu dalam hal pendidikannya, maupun keahlian yang ada pada individu masyarakat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, kuesioner dan observasi yang dilakukan penulis terhadap indikator sumber daya pada implementasi pemberdayaan masyarakat desa diperoleh kesimpulan, bahwa indikator sumber daya belum terimplementasi dengan baik, dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat desa baik secara keahlian maupun pendidikannya, yang menyebabkan sumber daya menjadi faktor yang menyebabkan kurang terimplementasinya program pemberdayaan masyarakat desa.

3. Struktur Birokrasi

Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno “Struktur Birokrasi diciptakan sebagai instrument dalam menangani keperluan-keperluan

publik, institusi yang dominan dalam kebijakan implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda”.

Permasalahan ketiga terkait dengan struktur birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam Implementasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis. Yang sejalan menurut Edward III dalam Winarno (2005: 150) Struktur birokrasi merupakan faktor yang penting dan fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Wawancara terkait struktur birokrasi meliputi bagaimana program PPMD dapat membangun fasilitas organisasi untuk masyarakat, dan Bagaimana pula pembagian wewenang dan tugas dalam menerangkan program PPMD kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kuala Penaso, Bapak Bosniar diperoleh jawaban bahwa:

Kami melakukan pertemuan setiap bulan kepada masyarakat dalam hal memberikan fasilitas organisasi bagi masyarakat dan memasukan anggota masyarakat kedalam beberapa struktur kepanitiaan dalam program PPMD. Pembagian wewenang berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh kepanitiaan program karena setiap anggota panitia memiliki kompetensi tersendiri untuk mendukung PPMD ini (Hasil Wawancara Tanggal 11 Desember 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa Bagaimana Program PPMD dapat membangun fasilitas organisasi untuk masyarakat?, dengan melakukan pertemuan setiap bulan kepada masyarakat dalam hal memberikan fasilitas organisasi bagi masyarakat dan memasukan anggota masyarakat kedalam beberapa struktur kepanitiaan dalam program PPMD.

Sedangkan Bagaimana pembagian wewenang dan tugas dalam menerangkan program PPMD kepada masyarakat, maka diberikan pelatihan atau workshop guna meningkatkan keterampilan masyarakat. Kemudian, BPD 1, Bapak Dedi mengatakan bahwa:

Dengan adanya PPMD ini silaturahmi dan persaudaraan melalui pertemuan dan rapat desa yang diadakan setiap bulannya sehingga masyarakat dengan mudah menyampaikan keluhan kesahnya karena telah di berikan ruang untuk berbicara serta dalam kepanitiaan PPMD masyarakat dilibatkan baik dari segi kepanitiaan maupun dari segi pembangunan atau proses. Sesuai dengan yang ada di struktur panitia (Hasil Wawancara Tanggal 16 Desember 2019).

BPD 1 Bapak Dedi mengatakan cara Program PPMD dapat membangun fasilitas organisasi untuk masyarakat seperti dengan adanya PPMD ini silaturahmi dan persaudaraan melalui pertemuan dan rapat desa yang diadakan setiap bulannya sehingga masyarakat dengan mudah menyampaikan keluhan kesahnya karena telah di berikan ruang untuk berbicara serta dalam kepanitiaan PPMD masyarakat dilibatkan baik dari segi kepanitiaan maupun dari segi pembangunan atau proses. Sedangkan cara pembagian wewenang dan tugas dalam menerangkan program PPMD kepada masyarakat sudah ada dan sesuai dengan yang ada di struktur panitia. Kemudian jawaban wawancara dari BPD2 Bapak Haryanto mengatakan bahwa:

Anggota masyarakat ikut kedalam panitia program yang ada di PPMD. Orang yang berada didalam program adalah mereka yang terpilih karena keahlian mereka sehingga mereka bisa menjalankan program dengan baik untuk masyarakat (Hasil Wawancara Tanggal 16 Desember 2019).

BPD2 Bapak Haryanto mengatakan cara Program PPMD dapat membangun fasilitas organisasi untuk masyarakat, dengan Anggota masyarakat ikut kedalam panitia program yang ada di PPMD. Sedangkan cara pembagian wewenang dan tugas dalam menerangkan program PPMD kepada masyarakat ialah orang yang berada didalam program adalah mereka yang terpilih karena keahlian mereka sehingga mereka bisa menjalankan program dengan baik untuk masyarakat. Kemudian jawaban wawancara dari BPD3 Bapak Mena mengatakan bahwa:

Masyarakat ikut serta dalam pertemuan rutin dan dalam panitia program. Itu sesuai tugas berdasarkan urutan panitanya sendiri (Hasil Wawancara Tanggal 17 Desember 2019).

BPD3 Bapak Mena mengatakan cara Program PPMD dapat membangun fasilitas organisasi untuk masyarakat terkait PPMD, masyarakat ikut serta dalam pertemuan rutin dan dalam panitia program. Sedangkan cara pembagian wewenang dan tugas dalam menerangkan program PPMD kepada masyarakat adalah sesuai sesuai tugas berdasarkan urutan panitanya sendiri. Kemudian jawaban wawancara dari Sekretaris Desa Bapak Abdul Bakar mengatakan bahwa:

Masyarakat diberikan tempat dalam menyampaikan kebutuhan masyarakatnya melalui pertemuan rutin. Setiap yang ada di dalam kepanitiaan itu memiliki keahlian masing-masing jadi bisa dipertanggung jawabkan wewenangnya dalam mengemban tugas (Hasil Wawancara Tanggal 11 Desember 2019).

Sekretaris Desa Bapak Abdul Bakar mengatakan cara Program PPMD dapat membangun fasilitas organisasi untuk masyarakat terkait PPMD, masyarakat diberikan tempat dalam menyampaikan kebutuhan

masyarakatnya melalui pertemuan rutin. Sedangkan cara pembagian wewenang dan tugas dalam menerangkan program PPMD kepada masyarakat adalah setiap yang ada di dalam kepanitiaan itu memiliki keahlian masing-masing jadi bisa dipertanggung jawabkan wewenangnya dalam mengemban tugas. Kemudian jawaban wawancara dari Kaur pembangunan Bapak Suctpto mengatakan bahwa:

Sejak ada PPMD masyarakat jadi lebih gampang untuk menyampaikan keluhan kesahnya. Wewenang dan tugas hanya di berikan kepada mereka yang memiliki keahlian di bidangnya (Hasil Wawancara Tanggal 12 Desember 2019).

Kaur pembangunan Bapak Suctpto mengatakan bagaimana Program PPMD dapat membangun fasilitas organisasi untuk masyarakat terkait PPMD, *masyarakat jadi lebih gampang untuk menyampaikan keluhan kesahnya.* Sedangkan cara pembagian wewenang dan tugas dalam menerangkan program PPMD wewenang dan tugas hanya di berikan kepada mereka yang memiliki keahlian di bidangnya

Berdasarkan hasil jawaban sebaran kuesioner penelitian tentang Implementasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis pada indikator struktur birokrasi, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.3 Jawaban Kuesioner tentang Implementasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis pada indikator struktur birokrasi

No	Pertanyaan tentang	Jumlah Responden Menjawab Skor (%)				Jumlah
		4	3	2	1	
1	Program PPMD dapat membangun fasilitas organisasi untuk masyarakat yang butuh.	3 (27,27%)	6 (54,55%)	2 (18,18%)	-	11 (100%)
2	Terpeliharanya keanggotaan secara umum dan sosial	2 (18,18%)	6 (54,55%)	3 (27,27%)	-	11 (100%)
3	Pembagian wewenang telah sesuai dengan bidang kerja masing-masing aparat terkait yang bertugas dalam menerangkan program PPMD kepada masyarakat	1 (9,09%)	7 (63,64%)	3 (27,27%)	-	11 (100%)
Jumlah		6	19	8	-	11
Rata-rata (%)		2 (18,18%)	6 (57,58%)	3 (24,24%)	-	11 (100%)

Sumber: Data Hasil Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan hasil jawaban kuesioner oleh 11 orang responden (kepala keluarga) dari tabel V.6 diatas tersebut, bahwa rata-rata 2 orang (18,18%) menyatakan sangat setuju, 6 orang (57,58%) menyatakan setuju, 3 orang (24,24%) menyatakan tidak setuju, dan 0 orang (0%) menyatakan sangat tidak setuju mengenai implementasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis ditinjau dari aspek struktur birokrasi.

Berdasarkan hasil observasi yang ditemukan penulis, dapat disimpulkan bahwa indikator struktur birokrasi sudah sesuai dengan tujuan dari struktur birokrasi tersebut, dimana pemerintah setempat sudah melakukan rapat temu masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang implementasi pemberdayaan masyarakat kepada warga, serta mau memaknai warga yang mempunyai keahlian untuk masuk dalam melancarkan program pemberdayaan masyarakat tersebut. Namun karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan yang ada, menyebabkan indikator tersebut tidak berjalan sempurna. Pemerintah daerah setempat sudah melakukan acara kegiatan musyawarah, serta aparat desa yang ada sudah membuka wadah untuk masyarakat menyampaikan keluhan kesah yang ada, agar dapat ditindak lanjuti oleh aparat desa untuk melancarkan program pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara, kuesioner dan observasi yang dilakukan peneliti terhadap indikator struktur birokrasi terhadap implementasi pembangunan pemberdayaan masyarakat desa, sudah terealisasi sebagaimana maksud dan tujuan dari struktur birokrasi tersebut. Dimana perangkat desa yang ada sudah memberikan arahan kepada masyarakat desa dalam merealisasikan program pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpendapat sebagaimana kebutuhan masyarakat desa. Serta aparat desa sudah melakukan temu rapat kepada masyarakat desa secara rutin.

4. Disposisi

Menurut Edward III dalam Winarno (2005: 142-143) Disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Sedangkan menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006: 162) “sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik”.

Permasalahan keempat terkait dengan disposisi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam Implementasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis. Wawancara terkait disposisi meliputi Apakah dengan adanya PPMD dapat membuat keberlanjutan pembangunan infrastruktur, dan apakah dengan adanya PPMD pemanfaat insfrastrukur terbangun?.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kuala Penaso, Bapak Bosniar diperoleh jawaban bahwa:

Pasti, karena dalam PPMD adanya program yang saling berkaitan dan berkesinambungan jadi tidak berhenti di satu program saja. Sangat terbangun meskipun sekarang kami masih dalam tahap pembangunan infrastruktur (Hasil Wawancara Tanggal 11 Desember 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa apakah dengan adanya PPMD dapat membuat keberlanjutan pembangunan infrastruktur?, terkait dengan PPMD, Pasti, karena dalam PPMD adanya program yang saling berkaitan dan berkesinambungan jadi tidak berhenti di satu program saja. Sedangkan apakah dengan adanya PPMD pemanfaat insfrastrukur

terbangun?, sangat terbangun meskipun sekarang masyarakat masih dalam tahap pembangunan infrastruktur. Kemudian, BPD 1 Bapak Dedi mengatakan bahwa:

Infrastruktur tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya keberlanjutan program jadi dalam PPMD pun begitu. Sangat ada karena peningkatan infrastruktur adalah yang sangat di harapkan oleh masyarakat (Hasil Wawancara Tanggal 16 Desember 2019).

Pertanyaan mengenai adanya PPMD dapat membuat keberlanjutan pembangunan infrastruktur, menurut BPD1 Bapak Dedi tidak bisa tanpa adanya keberlanjutan program jadi dalam PPMD. Sedangkan mengenai adanya PPMD pemanfaat insfrastrukur terbangun?, terbangun karena peningkatan infrastruktur adalah yang sangat di harapkan oleh masyarakat. Kemudian, BPD2 Bapak Haryanto mengatakan bahwa:

Iya, karena sesama infrastruktur saling berkaitan. Iya karena itu merupakan tujuan dari dibangunnya infrastruktur yaitu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (Hasil Wawancara Tanggal 16 Desember 2019).

Menurut BPD2 Bapak Haryanto bahwa Adanya PPMD dapat membuat keberlanjutan pembangunan infrastruktur, dan Dengan Adanya PPMD pemanfaat insfrastrukur terbangun. Kemudian hasil wawancara dengan BPD3, Bapak Mena bahwa:

Iya, karena di desa ini banyak yang harus di bangun jadi tidak bisa hanya berhenti di satu pembangunan atau program saja. Iya, itulah yang sangat di harapkan masyarakat (Hasil Wawancara Tanggal 17 Desember 2019).

Menurut BPD3 Bapak Mena bahwa Adanya PPMD dapat membuat keberlanjutan pembangunan infrastruktur, dan Dengan Adanya PPMD

pemanfaat insfrastrukur terbangun. Kemudian hasil wawancara dengan sekretaris desa, Bapak Abdul Bakar bahwa:

Iya karena kebutuhan infrastruktur masyarakat untuk saat ini masih jauh dari kata memadai. Semua tergantung dari pemanfaatan masyarakat jika masyarakat sadar akan manfaatnya maka akan berlangsung lama tapi jika tidak maka program akan menjadi sia-sia dan itu sangat tidak kami harapkan (Hasil Wawancara Tanggal 11 Desember 2019).

Jawaban sekretaris desa Bapak Abdul Bakar bahwa Adanya PPMD dapat membuat keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Sedangkan mengenai adanya PPMD pemanfaat insfrastrukur terbangun, semua tergantung dari pemanfaatan masyarakat jika masyarakat sadar akan manfaatnya maka akan berlangsung lama tapi jika tidak, maka program akan menjadi sia-sia dan itu sangat tidak diharapkan. Kemudian hasil wawancara dengan Kaur pembangunan, Bapak Sucipto bahwa:

Itulah adalah harapan kami yaitu pembangunan di desa kami tidak berhenti hanya di satu pembangunan saja tapi berkelanjutan karena sebenarnya semua masih satu kesatuan. Iya. Karena jika dilihat dari masyarakat kami adalah masyarakat yang menginginkan adanya infrastruktur yang memadai (Hasil Wawancara Tanggal 12 Desember 2019).

Menurut Kaur pembangunan Bapak Sucipto bahwa Adanya PPMD dapat membuat keberlanjutan pembangunan infrastruktur, dan Dengan Adanya PPMD pemanfaat insfrastrukur terbangun. Kemudian hasil wawancara dengan Kaur pembangunan, bahwa:

Berdasarkan hasil jawaban sebaran kuesioner penelitian tentang Implementasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan

Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis pada indikator disposisi, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.4 Jawaban Kuesioner tentang Implementasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis pada indikator disposisi

No	Pertanyaan tentang	Jumlah Responden Menjawab Skor (%)				Jumlah
		4	3	2	1	
1	Dengan Adanya PPMMD dapat membuat keberlanjutan pembangunan infrastruktur	2 (18,18%)	6 (54,55%)	3 (27,27%)	-	11 (100%)
2	Dengan Adanya PPMMD pemanfaat insfrastrukur terbangun	2 (18,18%)	6 (54,55%)	3 (27,27%)	-	11 (100%)
3	Dengan adanya PPMMD maka sarana dan prasarana untuk pembangunan akan saling bersinergi pemanfaatanya.	2 (18,18%)	7 (63,64%)	2 (18,18%)	-	11 (100%)
Jumlah		6	19	8	-	11
Rata-rata (%)		2 (18,18%)	6 (57,58%)	3 (24,24%)	-	11 (100%)

Sumber: Data Hasil Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan hasil jawaban kuesioner oleh 11 orang responden (kepala keluarga) dari tabel V.7 diatas tersebut, bahwa rata-rata 2 orang (18,18%) menyatakan sangat setuju, 6 orang (57,58%) menyatakan setuju, 3 orang (24,24%) menyatakan tidak setuju, dan 0 orang (0%) menyatakan sangat tidak setuju mengenai implementasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis ditinjau dari aspek struktur disposisi.

Sedangkan pada rekapitulasi kuesioner responden (kepala keluarga) masyarakat desa Kuala Penaso yang meliputi empat poin indikator dari implementasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.5 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Tentang Implementasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis

No	Indikator	Jumlah Responden Menjawab Skor (%)				Jumlah
		4	3	2	1	
1	Komunikasi	2 (15,15%)	5 (42,42%)	4 (39,39%)	0,33 (3,03%)	11 (100%)
2	Sumber Daya	1 (9,09%)	5 (42,42%)	4 (39,39%)	1 (9,09%)	11 (100%)
3	Struktur birokrasi	2 (18,18%)	6 (57,58%)	3 (24,24%)	-	11 (100%)
4	Disposisi	2 (18,18%)	6 (57,58%)	3 (24,24%)	-	11 (100%)
Jumlah		7	22	14	1	43
Rata-rata (%)		2 (15,15%)	6 (50,00%)	4 (31,82%)	0,33 (3,03%)	11 (100%)

Berdasarkan tabel V.8 di atas, bahwa hasil rekapitulasi jawaban kuesioner oleh 11 orang responden (kepala keluarga) untuk keempat indikator (aspek) implementasi, pada Implementasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis, diketahui rata-rata 2 orang (15,15%) menyatakan sangat setuju, 6 orang (50,00%) menyatakan setuju, 4 orang (31,82%) menyatakan tidak setuju, dan 0 orang (3,03%) menyatakan sangat tidak setuju.

Dikarenakan yang menjawab setuju dan sangat setuju adalah 65,15% (50,00%+15,15%). Berdasarkan teknik pengukuran pada bab II, maka persentase

tersebut termasuk kategori kurang terimplementasi atau pada rentang 34-66%. Dengan demikian, Hipotesis yang berbunyi “Kurang Terlaksananya” Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis Tepat Sasaran Sepenuhnya dapat diterima.

Berdasarkan analisis data penelitian tersebut di atas, bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis dapat diketahui dari indikator komunikasi sumber daya struktur birokrasi dan indikator disposisi. Lebih jelasnya dibahas sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis adalah dengan memberikan kemudahan pesan atau arahan akan PPMD kepada masyarakat, serta melibatkan masyarakat menjadi anggota atau panitia PPMD Di Kuala Penaso. Sedangkan menurut masyarakat, komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis adalah kurang terimplementasi. Karena total responden yang memberikan jawaban setuju dan sangat setuju adalah $42,42\% + 15,15\% = 57,57\%$ atau berada pada interval 34-66% (kurang terimplementasi).

Sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, dan dari pihak pemerintah hanya memberikan pelatihan kepada masyarakat. Sedangkan menurut masyarakat, sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis adalah kurang terimplementasi. Karena total responden yang memberikan jawaban setuju dan sangat setuju adalah $42,42\% + 9,09\% = 51,51\%$ atau berada pada interval 34-66% (kurang terimplementasi).

Struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis adalah adanya fasilitas organisasi untuk masyarakat, dan adanya pembagian wewenang dan tugas dalam menerangkan program PPMD kepada masyarakat. Sedangkan menurut masyarakat, struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis adalah terimplementasi. Karena total responden yang memberikan jawaban setuju dan sangat setuju adalah $18,18\% + 57,58\% = 75,76\%$ atau berada pada interval 67-100% (terimplementasi).

Disposisi yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis adalah dengan Adanya PPMD dapat membuat keberlanjutan pembangunan infrastruktur, dan adanya pemanfaatan PPMD maka infrastruktur dapat terbangun. Sedangkan menurut masyarakat, struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis adalah kurang terimplementasi. Karena total responden yang memberikan jawaban setuju dan sangat setuju adalah $18,18\% + 57,58\% = 75,76\%$ atau berada pada interval 67-100% (terimplementasi).

Secara keseluruhan, Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis adalah kurang terimplementasi. Karena rata-rata total responden yang memberikan jawaban setuju dan sangat setuju adalah $50,00\% + 15,15\% = 65,15\%$ atau berada pada interval 34-66% (kurang terimplementasi).

Berdasarkan hasil observasi dilakukan peneliti di Desa Kuala Penaso untuk melihat Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa, diperoleh kesimpulan bahwa indikator disposisi sudah sesuai dengan makna serta tujuannya. Dimana pemerintah setempat sudah tepat sasaran dalam hal memutuskan kebijakan untuk pembangunan pemberdayaan masyarakat desa, serta sesuai dengan

yang dibutuhkan masyarakat setempat, tinggal masyarakat setempat yang ikut andil sesuai dengan arahan pejabat pemerintah dapat menjalankan tugas yang telah diberikan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara, kuesioner dan observasi yang dilakukan peneliti terhadap indikator birokrasi diperoleh kesimpulan bahwa, indikator birokrasi pada implementasi pemberdayaan masyarakat desa, sudah terealisasi sebagaimana tujuan dari indikator birokrasi tersebut. Dimana aparat desa yang memiliki kewenangan dalam memutuskan kebijakan sudah baik dalam memberi arahan kepada perangkat desa, untuk membangun program pembangunan pemberdayaan masyarakat desa yang mana terlebih dulu, disesuaikan dengan kepentingan bersama masyarakat.

D. Kendala Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pembangunan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis

Kendala implementasi diketahui dari indikator sumber daya, yang mana dari 3(tiga) pertanyaan terdapat satu pertanyaan yang memperoleh skor terendah dibandingkan pertanyaan lainnya pada indikator sumber daya yaitu tentang “apakah semua program PPMD dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat”. Dengan demikian program PPMD belum mampu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat desa, di kecamatan Pinggir desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis.

1. Indikator Sumberdaya

Sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di

Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Karena total responden yang memberikan jawaban setuju dan sangat setuju adalah $42,42\% + 9,09\% = 51,51\%$ atau berada pada interval 34-66% (kurang terimplementasi).

2. Indikator Komunikasi

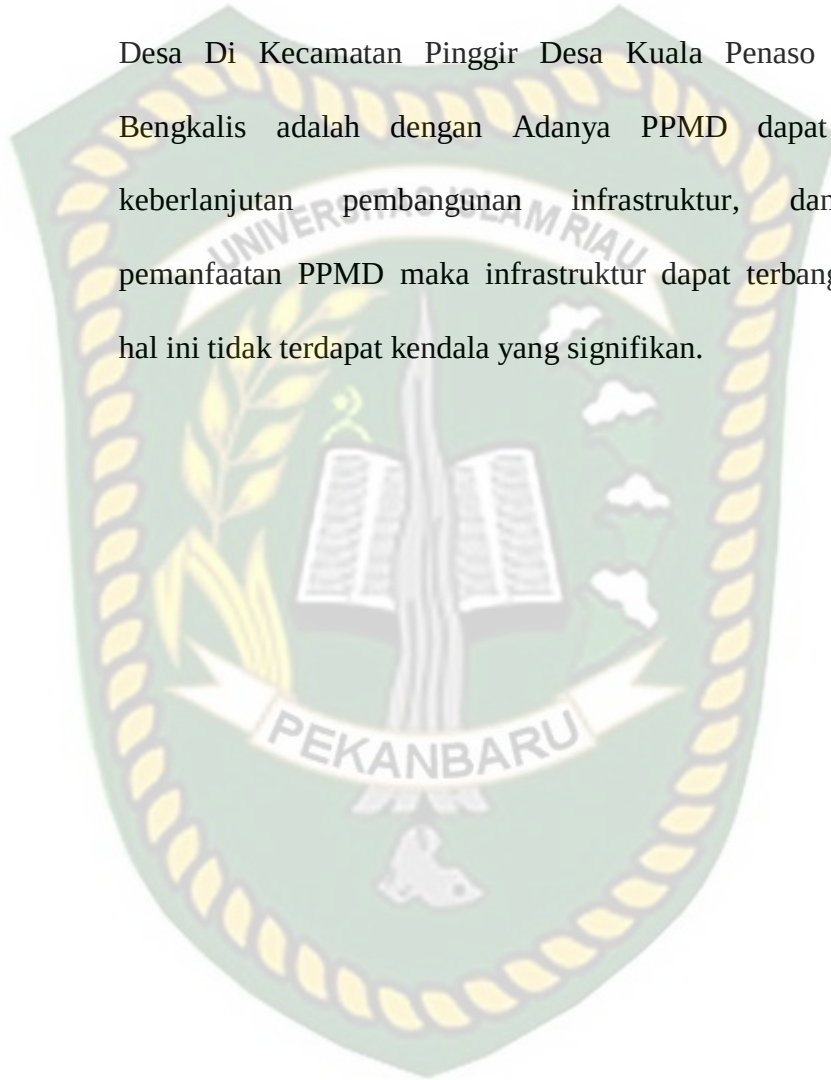
Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis adalah dengan memberikan kemudahan pesan atau arahan akan PPMD kepada masyarakat, serta melibatkan masyarakat menjadi anggota atau panitia PPMD Di Kuala Penaso yang diterima dengan baik oleh masyarakat.

3. Indikator Struktur Birokrasi

Menurut masyarakat, struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis adalah terimplementasi, dan tidak mendapatkan kendala. Karena total responden yang memberikan jawaban setuju dan sangat setuju adalah $18,18\% + 57,58\% = 75,76\%$ atau berada pada interval 67-100% (terimplementasi).

4. Indikator disposisi

Disposisi yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis adalah dengan Adanya PPMD dapat membuat keberlanjutan pembangunan infrastruktur, dan adanya pemanfaatan PPMD maka infrastruktur dapat terbangun, dalam hal ini tidak terdapat kendala yang signifikan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis adalah kurang terimplementasi, karena berada pada interval 34-66% (kurang terimplementasi).
2. Kendala Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Pinggir Desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis adalah masih kurangnya sumber daya, karena belum mampu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat desa, di kecamatan Pinggir desa Kuala Penaso Kabupaten Bengkalis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak pemerintah desa sebaiknya berkerja sama dengan Badan pemberdayaan masyarakat dan desa (BPMD) Kabupaten Bengkalis agar program Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa lebih dapat ditingkatkan. Baik dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dan turun langsung kelapangan bertemu masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang program yang dilakukan pemerintah setempat untuk membantu masyarakat.

2. Kepada BPMD sebaiknya meningkatkan sumber daya dalam pelaksanaan program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Baik dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang berguna untuk masyarakat dalam meningkatkan keahlian masing-masing masyarakat setempat, untuk diikuti sertakan dalam program pemberdayaan masyarakat desa.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Agustino, Leo. 2008. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung; CV. Alfabeta.

Awang, Azam, 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

A.W.Widjaja, *Administrasi Kepegawian*, Rajawali, Jakarta, 2006.

Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Beratha, I Nyoman, 1982, *Desa, Masyarakat Desa, dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

B Winarno, 2012, *Kebijakan Publik*, CAPS, Yogyakarta,

Dawam, Rahardjo. 1997; *Wawasan dan Misi Pembangunan abad 21*, Intermasa Jakarta

Gunawan Sumodiningrat, 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, Jakrta: PT Gramedia Pustaka Utama

Handoko, T. Hani, 2003, *Manajemen Edisi Kedua*, BPFE. Yogyakarta.

Hanif Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*.

Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta : penerbit ERLANGGA

Haw. Widjaya, *Penyelenggaraan Otomi di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan daerah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005.

Husaini, Usman dkk, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara Jakarta

- Irfan, Islamy M,. 2004. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Edisi 2, Cetakan 13. Bumi Aksara. Jakarta
- Kartasasmita, G.1996. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : CIDES
- Labolo, Muhadam. 2007. *Memahami ilmu pemerintahan*. Jakarta. Rajawali pers.
- Lexy, Moleong. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Pusda Karya Bandung
- Mahendra Putra Kurnia, dkk. 2007. *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*.
- Manullang, 2009. *Manajemen*. Gadjah Mada University. Press. Ypgyakarta.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *StudiKebijakan Publik dan Pelayanan Public*. Alfabeta Bandung
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Elydar Chaidir
- Musanef. 2000. *Sumber Daya Manusia: Tinjauan Kualitas dan Kinerja*. Jakarta Sinar Grafika
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta, Rinekacipta
- Ndraha, Taliziduhu, 2005. *Kybernology*. Jakarta, Rineka Cipta
- Ndraha, Taliziduhu, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Nugroho, 2004, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, PT. Gramedia, Jakarta
- Sanapiah, Faisal. 2003. *Format-format Penelitian Sosial Cetakan keenam*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Sedarmayanti, *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” Bagian Kedua Edisi revisi*, Mandar Maju, Bandung, Jakarta, 2012.

Sholichin Abdul, Wahab S. 2005. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi 2, cetakan 5. Bumi Aksara. Jakarta

Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Surachmad, Winarno. 1985. *Dasar-Dasar Teknik Research*, PN Balai Cetak Keenam,

Sutrisno, Hadi. 2000. *Metodologi Research* , Pustaka Pelajar,

Wibawa, S., Purbokusumo Y., Pramusinto A. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta : PT. Raja grafindo Persada.

Makalah H. Restyarto Efiawan. *Regional Management Sebagai Pendekatan Alternatif Pengelolaan Pembangunan Antar Daerah dalam Era Desentralisasi*

UU Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*

PermenDesaPDTT Nomor 17 Tahun 2019 *Tentang Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat Desa*

UU Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014*

Lampiran 1

WAWANCARA PENELITIAN

TENTANG